WARTA PEMERIKSA

EDISI 6 ■ VOL. V ■ JUNI 2022

G20 INDONESIA 2022

SAI20 INDONESIA 2022

AKUNTABILITAS UNTUK SEMUA

CATATAN UNTUK LKPP 2021

7
WTP Bukan Tujuan Akhir

15
BPK Ungkap Masalah Pencegahan Wabah Penyakit dari Hewan

55
Membantu CPNS Beradaptasi dengan Habituasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021. Meskipun tidak mempengaruhi opini WTP, BPK menyampaikan sejumlah catatan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah demi meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Catatan itu menjadi salah satu laporan utama yang redaksi siapkan dalam *Warta Pemeriksa* edisi Juni 2022 di rubrik Sorotan. Berdasarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan 27 permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan. Meski tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021, namun tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah guna perbaikan pengelolaan APBN.

Presiden Joko Widodo juga bersyukur karena LKPP TA 2021 mendapatkan opini WTP. Meskipun begitu, dia menegaskan WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara. Karenanya, pemerintah terus berupaya meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Pemerintah juga terus bekerja melaksanakan program-program dengan memperhatikan tata kelola yang baik, tata kelola keuangan yang baik.

Di rubrik BPK Bekerja, redaksi juga menyiapkan laporan yang terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Laporan tersebut mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis TA 2020-semester I TA 2021 yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya.

Yang menarik adalah hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi dapat menghambat efektivitas pengelolaan limbah B3 medis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini menjadi penting mengingat selama dua tahun belakangan Indonesia memasuki masa pandemi lantaran Covid-19. Sehingga, pengelolaan limbah B3 medis harus mendapat perhatian yang sangat serius.

Redaksi juga menyiapkan laporan khusus mengenai Supreme Audit Institution 20 (SAI20). Ini merupakan inisiasi yang berfokus kepada upaya terciptanya *good and accountable governance* melalui peningkatan peran SAI sebagai mitra strategis pemerintah.

Output yang diharapkan dan *key deliverables* dari SAI20 yaitu berupa *communiqué* kepada pemimpin negara-negara G20. Isinya yaitu rekomendasi mengenai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi global pasca-Covid-19 dan percepatan pencapaian SDGs Agenda 2030.

Dalam menghasilkan *communiqué* yang menjawab isu-isu prioritas tersebut, SAI20 merencanakan beberapa agenda pertemuan selama periode satu tahun masa Presidensi G20 Indonesia. Dimulai dari Pertemuan Teknis, Senior Officials Meeting, dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Selamat menikmati. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah
Isma Yatun
Agus Joko Pramono
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab
Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi
Selvia Vivi Devianti

Kepala Sekretariat
Bestantia Indraswati

Sekretariat
Bambang Supriedi
Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi
Sutriono
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Frenny Artiningrum S
Apriyana
Sudarman

Alamat Sekretariat
Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

4 CATATAN UNTUK LKPP 2021

Walau LKPP 2021 mendapat opini WTP, upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara tetap perlu terus dilakukan.

7 WTP BUKAN TUJUAN AKHIR

9 PEMERINTAH PENUHI SEBAGIAN BESAR KRITERIA PILAR TRANSPARANSI FISKAL

13 BPK PERIKSA PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS

15 BPK UNGKAP MASALAH PENCEGAHAN WABAH PENYAKIT DARI HEWAN

17 MENGGENJOT PENGEMBANGAN 10 BALI BARU

20 OPTIMALISASI PEMERIKSAAN JARAK JAUH

24 SAI20 MITRA UTAMA G20 PERKUAT AKUNTABILITAS

Semangat negara-negara G20 dalam meminimalkan dampak krisis juga harus ditopang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

26 SAI 20 SENIOR OFFICIALS MEETING HASILKAN DRAF KOMUNIKE

27 TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS TAK BISA DITAWAR

30 URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN SAI20

33 JADI PEMBICARA TAMU, KETUA BPK BERBICARA MENGENAI SAI PMF

34 ANAO KUNJUNGI KANTOR PERWAKILAN KALBAR

35 KANTOR PERWAKILAN KALSEL BELAJAR MENGENAI SKEPTISISME PROFESIONAL

36 LAKUKAN TATAP MUKA, ANAO BAHAS CORPU, *QA REVIEW*, DAN *GENDER POLICY*

39 NANY LESTARI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL 'MENGUBAH *MINDSET* MASYARAKAT JADI TANTANGAN UTAMA PENGELOLAAN SAMPAH'

42 ASEP KUSWANTO, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (LH) DKI JAKARTA 'DKI BANGUN PLTSA HINGGA E-WASTE UNTUK KELOLA SAMPAH'

47 MENGENAL LEBIH DEKAT ICED, PUSAT PELATIHAN AUDIT LINGKUNGAN DAN SDGS DI INDIA

51 SATKER BPK TERAPKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

55 MEMBANTU CPNS BERADAPTASI DENGAN HABITUASI

57 (KEMBALI) MERAJUT KHAYAL TENTANG #PEMERINTAHANDIGITAL

60 BERITA FOTO

CATATAN UNTUK LKPP 2021

Walau LKPP 2021 mendapat opini WTP, upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara tetap perlu terus dilakukan.

Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

■ Penyerahan LHP atas LKPP kepada Presiden, di Istana Bogor, Kamis (23/6).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021. Kendati demikian, ada sejumlah catatan yang diberikan BPK untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah demi meningkatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2021 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 23 Juni 2022, menyampaikan, opini WTP atas LKPP Tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP Tahun 2021.

Sebanyak empat LKKL, yakni Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (atau BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (atau LIPI) Tahun 2021 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun demikian, pengecualian pada LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2021. "Kami berharap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar nantinya seluruh kementerian/ lembaga dapat memperoleh opini WTP," kata Ketua BPK dalam sambutannya.

Walau LKPP 2021 mendapat opini WTP, upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara tetap perlu terus dilakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan 27 permasalahan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

"Meski tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021, namun tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah guna per-

> **Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.**

baikan pengelolaan APBN," tegas Ketua BPK.

Beberapa temuan tersebut, antara lain, pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 sebesar Rp15,31 Triliun belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pemerintah untnuk menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan Wajib Pajak dan disetujui. Selain itu, menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai.

Temuan lainnya, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan bahwa ada piutang pajak macet sebesar Rp20,84 triliun yang belum dilakukan tindakan penagihan secara memadai. "Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah, antara lain, agar melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan per 30 Juni 2022 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan," kata Ketua BPK.

Ada juga temuan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja Non-Program PCPEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp12,52 triliun yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Ketua BPK mengatakan, BPK merekomendasikan pemerintah agar memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.

Ketua BPK berharap pemerintah melakukan upaya efektif untuk menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna mengoptimalkan kualitas LKPP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Ketua BPK menyampaikan, BPK sejak 2005 hingga 2021 telah menyampaikan 19.802 temuan pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKBUN dengan 42.553 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 75 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, 19 persen telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi, 5 persen belum ditindaklanjuti, dan 1 persen tidak dapat ditindaklanjuti.

"Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan basis untuk meningkatkan performa pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, kami mengharapkan Bapak Presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK," kata Ketua BPK.

Defisit berhasil ditekan

Sebelum menyampaikan LHP atas LKPP 2021 kepada Presiden RI, BPK melakukan penyerahan LHP kepada DPR dan DPR. Saat menyampaikan LHP LKPP kepada DPR, Ketua BPK menyampaikan bahwa defisit anggaran tahun 2021 tercatat sebesar Rp775,06 triliun atau 77 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021.

"Realisasi Defisit Anggaran tersebut mencapai 4,57 persen dari PDB atau lebih rendah dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70 persen dari PDB," kata Ketua BPK.

Ketua BPK menyampaikan, realisasi defisit anggaran tahun 2021 juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2020. Pada 2020 atau pada tahun pertama pandemi Covid-19, defisit anggaran tercatat mencapai 6,14 persen dari PDB. Jika dinominalkan,

Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

■ Penyerahan LHP atas LKPP kepada Presiden, di Istana Bogor, Kamis (23/6).

Sejumlah Temuan Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dalam LKPP 2021

- Penentuan Kriteria Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2021 dan Pelaporan pada LKPP Tahun 2021 (Audited) Belum Sepenuhnya Memadai.
- Sistem Informasi dan Pelaporan atas Target dan Realisasi Capaian Output Program Prioritas Nasional dan Program PCPEN Belum Sepenuhnya Memadai untuk Mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Pengelolaan Insentif dan Fasilitas Perpajakan Tahun 2021 Sebesar Rp15,31 Triliun Belum Sepenuhnya Memadai.
- Pengendalian Dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Sebesar Rp10,20 Triliun pada Sepuluh Kementerian/Lembaga Tidak Memadai.
- Piutang Pajak Macet Sebesar Rp20,84 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai.
- Perlakuan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Sebagai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya pada LKPP Tahun 2021 Belum Didukung Keselarasan Regulasi, Kejelasan Skema Pengelolaan Dana, dan Penyajian dalam Laporan Keuangan BP Tapera.

PERKEMBANGAN OPINI WTP

Opini	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	80	82	85	85	84
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	6	4	2	2	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2	1	1	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	**88**	**87**	**88**	**87**	**88**

Sumber: LHP LKPP 2021

angka defisit anggaran 2020 mencapai Rp947,7 triliun.

Defisit anggaran 2021 sebesar Rp775,06 triliun diperoleh dari realisasi pendapatan dan hibah yang sebesar Rp2.011,34 triliun, sementara belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun. Terkait pembiayaan tahun 2021, pemerintah melaporkan realisasi pembiayaan senilai Rp871,72 triliun atau 87 persen dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi pembiayaan dalam negeri senilai Rp881,62 triliun dan realisasi pembiayaan luar negeri senilai minus Rp9,91 triliun.

Adapun saat menyampaikan LHP LKPP kepada DPD, Ketua BPK secara khusus mengungkapkan temuan yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Menurut ketua BPK, terdapat permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pengelolaan penggantian belanja K/L untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah melalui pemotongan DAU/DBH pemerintah daerah tidak memadai.

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar berkoordinasi dengan pemda terkait untuk menyelesaikan validasi data realisasi belanja K/L yang akan dibebankan kepada masing-masing pemda, untuk selanjutnya menetapkan KMK pemotongan DAU/DBH TA 2022 berdasarkan hasil validasi tersebut," kata Ketua BPK.

Permasalahan kedua yaitu sisa dana BOS reguler tahun 2020 dan 2021 minimal sebesar Rp1,25 triliun belum dapat disajikan sebagai piutang Transfer ke Daerah (TKD). BPK merekomendasikan pemerintah agar menyelaraskan peraturan terkait dengan status sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021 serta melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi atas sisa dana BOS reguler TA 2020 dan 2021. ●

WTP BUKAN TUJUAN AKHIR

Presiden menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Semua kelemahan harus segera diperbaiki, terutama yang terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

■ Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Penyampaian LHP LKPP Tahun Anggaran 2021 di Istana Bogor.

> **Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program.**

Presiden Joko Widodo bersyukur karena Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, Presiden menegaskan WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara.

Presiden saat menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 23 Juni mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Pemerintah juga terus bekerja melaksanakan program-program dengan memperhatikan tata kelola yang baik, tata kelola keuangan yang baik.

Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

■ Ketua BPK Isma Yatun bersama Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dan Anggota IV BPK Haerul Saleh dalam penyampaian LHP LKPP 2021 kepada Presiden.

"Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program," kata Presiden.

Presiden Jokowi menilai, opini WTP atas LKPP 2021 merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat. Laporan hasil pemeriksaan BPK akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.

Pemerintah, kata Presiden, akan menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Semua kelemahan harus segera diperbaiki, terutama yang terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan perbaikan tersebut, maka tata kelola keuangan negara akan semakin baik kedepannya.

"Predikat WTP bukanlah tujuan akhir. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya. Kepada para menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," kata Presiden.

Presiden dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas kerja sama BPK yang selalu memberikan masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara. "Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan serta semakin efektif dan tepercaya."

Apresiasi juga disampaikan Presiden di awal sambutannya. Presiden mengapresiasi Ketua BPK Isma Yatun dan seluruh Pimpinan BPK atas masukan dan dukungan yang selama ini diberikan, terutama di masa pandemi selama dua tahun terakhir. Presiden menekankan, tantangan yang dihadapi di masa kini maupun masa depan tidak semakin mudah. "Kita masih dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian yang mengharuskan kita semua harus tetap waspada," ujar Presiden.

Di saat ekonomi yang belum pulih sepenuhnya dari dampak pandemi Covid-19, dunia dikejutkan dengan perang di Ukraina yang mengganggu rantai pasok global. Dampak perang Rusia-Ukraina sangat luas dan memicu peningkatan inflasi di seluruh negara. Presiden menambahkan, ancaman krisis pangan dan ancaman krisis energi telah terjadi di semua negara.

"Situasi tersebut harus menjadi pemahaman bersama agar kita memiliki kepekaan yang sama, memiliki perasaan yang sama, menyikapi, menyiapkan respons dan kebijakan yang tepat di semua tataran lembaga negara, di seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kita harus memaksimalkan kekuatan kita sendiri, terutama kekuatan belanja dalam negeri." ●

PEMERINTAH PENUHI SEBAGIAN BESAR KRITERIA PILAR TRANSPARANSI FISKAL

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu atas pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Hasil pemeriksaan menunjukkan, pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal.

Reviu transparansi fiskal merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan The International Organization of Supreme Audit Institutions Principle 12 (INTOSAI-P 12) tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens* yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. INTOSAI-P 12 tersebut relevan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan ole Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan salah satu tujuannya adalah mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan.

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam The international Monetary Fund (IMF) Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2019. Selain itu, BPK merujuk pada IMF Fiscal Transparency Handbook 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

pch.vector-freepik

Pilar	Level			
	Not Met	Basic	Good	Advanced
Pelaporan Fiskal	0	0	5	7
Pelaporan Fiskal dan Penganggaran	0	1	6	5
Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	0	2	4	6
Manajemen Pendapatan Sumber Daya	0	7	3	1
Total	**0**	**10**	**18**	**19**
Persentase	**0%**	**21,27%**	**38,30%**	**40,43%**

Sesuai FTC Tahun 2019, reviu pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2021 mencakup empat pilar utama yaitu Pelaporan Fiskal, Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang meliputi 15 dimensi dengan 48 kriteria.

"Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,43 persen, level *good* sebanyak 18 kriteria atau 38,30 persen, dan level *basic* sebanyak 10 kriteria atau 21,27 persen. Terdapat satu kriteria pada Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya yang tidak dinilai (*not assessed*) yaitu dana sumber daya alam. Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut direviu dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2021," demikian disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2021.

Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, misalnya, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak tujuh kriteria, yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan dalam tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, sejarah revisi-revisi dan anggaran tambahan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak lima kriteria yaitu cakupan institusi, cakupan pengeluaran pajak, klasifikasi informasi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal Pemerintah pada level *advanced*, antara lain, Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUM Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban. Pemerintah telah menerbitkan laporan realisasi bulanan *i-account* secara teratur dan memublikasikan dalam laman *www.djpbn.kemenken.go.id*.

Kemudian terkait pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak lima kriteria. Kelima kriteria itu adalah kesatuan anggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Adapun kriteria transparansi yang berada pada *level good* sebanyak enam kriteria yaitu proyek-proyek investasi, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, anggaran tambahan dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak satu kriteria yaitu tujuan kebijakan fiskal.

"Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *advanced* yaitu Pemerintah melakukan penganggaran dengan memerhatikan dan mengungkapkan asumsi dasar ekonomi makro, komponen penyusun, dan asumsi yang mendasarinya," tulis BPK dalam LHR Transparansi Fiskal Tahun 2021.

BPK menyatakan, dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto. Dokumen anggaran juga telah memuat realisasi untuk lima tahun terakhir (2016-2020) dan proyeksi jangka menengah untuk tiga tahun ke depan Medium Term Budget Framework (MTBF) 2022-2024 yang disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Ketentuan hukum mengenai ketertiban dalam proses penganggaran telah membagi kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif. Pemerintah telah mengirimkan Rancangan Undang-Undang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dan Nota Keuangan (NK) TA 2021 serta disahkan DPR dalam periode waktu yang memadai.

Selanjutnya, dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kriteria transparansi fiskal yang berada pada *level advanced* sebanyak lima kriteria yaitu kesatuan anggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Sementara, kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak enam kriteria yaitu proyek-proyek investasi, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, anggaran tambahan dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak satu kriteria yaitu tujuan kebijakan fiskal.

Terkait kriteria tujuan kebijakan fiskal, kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *basic* yaitu NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama Tahun 2021. Kebijakan itu terdiri atas kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta pembiayaan. "Namun pada perhitungan komposisi belanja dan penerimaan negara berada pada kondisi tidak *precise*."

Pilar lainnya, yaitu pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak enam kriteria, yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontingensi, jaminan, kerja sama Pemerintah-Badan Usaha, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak empat kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan publik. Adapun kriteria transparansi yang berada pada level basic sebanyak dua kriteria yaitu kriteria arus dan kepemilikan sumber daya alam dan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang.

Kondisi-kondisi yang menempatkan transparansi fiskal Pemerintah pada level *advanced*, yaitu pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2021, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik *outcome* fiskal dalam kertas kerja simulasi.

Secara keseluruhan pada tahun 2021, ada satu kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2020, yaitu kriteria pelaporan oleh perusahaan sumber daya. Sedangkan capaian atas kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2021. ●

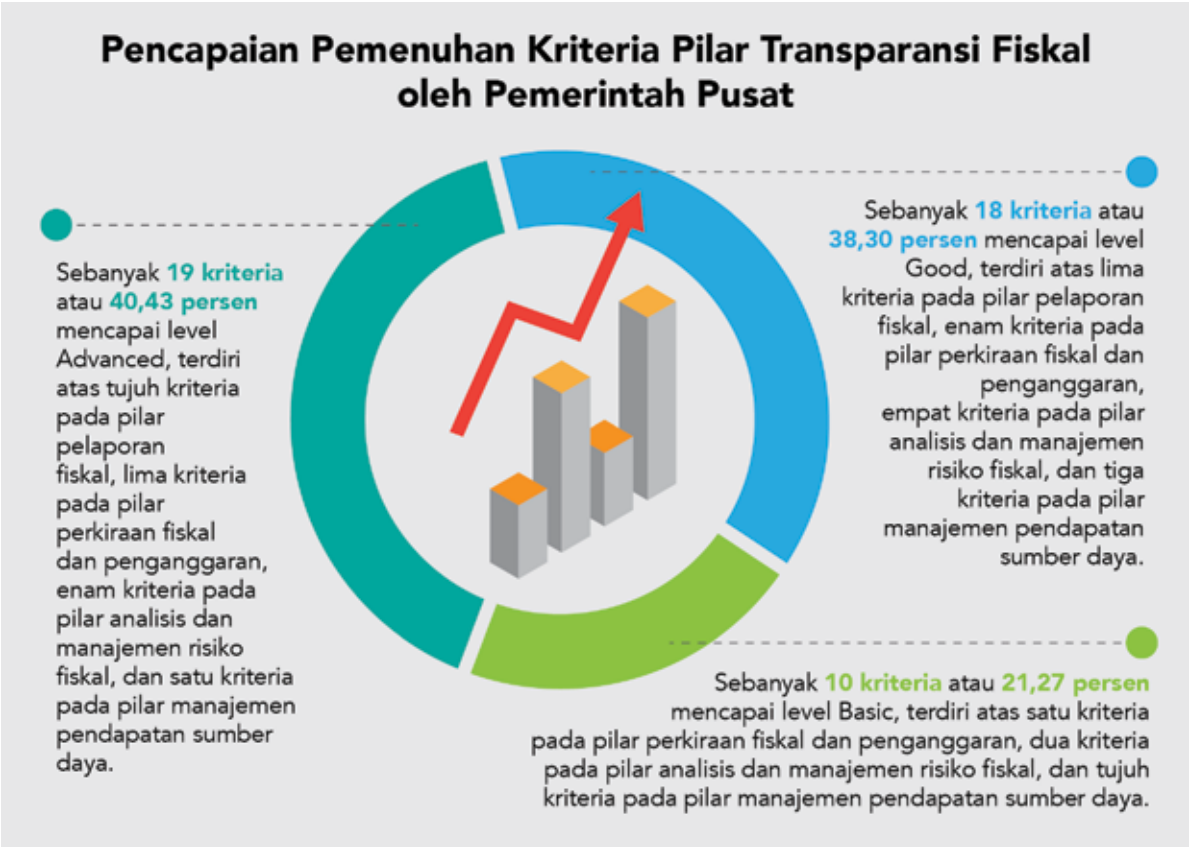

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
meraih penghargaan dalam

The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Sebagai Lembaga Terpopuler di Media Cetak Tahun 2021

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 25 Maret 2022.

Ilustrasi: Freepik

BPK PERIKSA PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS

Pemprov DKI Jakarta belum memiliki *grand design* atau *roadmap* pengelolaan limbah B3 medis yang komprehensif.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis TA 2020-semester I TA 2021 dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, dan instansi terkait lainnya. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya dalam pengelolaan limbah B3 medis antara lain sepuluh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang diobservasi telah melakukan pengurangan limbah B3 pada sumber dan menerapkan penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) atas limbah medis yang dihasilkan.

Selain itu, fasyankes milik Pemprov (RSUD dan Puskesmas) telah memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3 medis dengan pihak ketiga. Dinas Lingkungan Hidup juga telah memiliki aplikasi pengawasan dan pengendalian sebagai sarana penyampaian laporan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi dapat menghambat efektivitas pengelolaan limbah B3 medis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

BPK mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki *grand design* atau *roadmap* pengelolaan limbah B3 medis yang komprehensif. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan draf rapergub tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan limbah B3 medis dari fasyankes belum didukung dengan regulasi dan basis data yang lengkap dan belum mengatur keterlibatan/sinergi yang jelas, serta mekanisme koordinasi antarinstansi maupun pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan limbah B3 fasyankes di DKI Jakarta.

> **Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kepala Dinas PMPTSP untuk menyusun sistem *monitoring* dan *database* fasyankes terkait perizinannya, pengelolaan limbah B3 medisnya, maupun masa kerja sama pengelolaan limbah medisnya apabila menggunakan jasa pihak ketiga.**

Selain itu, draf rapergub tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan limbah dari fasyankes belum didukung studi kelayakan implementasi pengelolaan limbah B3 fasyankes berbasis wilayah. Hal tersebut mengakibatkan fasyankes dan pihak terkait belum memiliki pedoman formal yang jelas dalam mengelola limbah B3 medis.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memprioritaskan penyusunan regulasi, *grand design* atau *roadmap* pengelolaan limbah B3 medis yang komprehensif. Hal itu antara lain memuat standar pengelolaan limbah B3, sistem informasi dan *database* yang terintegrasi, mekanisme koordinasi antar instansi maupun pemangku kepentingan, penerapan pengelolaan limbah B3 medis fasyankes berbasis wilayah, serta perizinan dan penyediaan fasilitas/depo pengumpulan limbah B3 di masing-masing wilayah.

BPK juga menemukan DLH belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum atas fasyankes dan hotel/penginapan tempat isolasi mandiri bagi orang tanpa gejala. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan perencanaan pengawasan belum didukung *database* fasyankes yang terintegrasi dan DLH belum memiliki pedoman teknis pengawasan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif.

Kemudian, Bidang Pengelolaan Kebersihan (PK) belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian limbah B3 medis dari fasyankes tingkat dasar, pengawasan belum dilaksanakan secara berkala dan menyeluruh, pengawasan pengelolaan hotel isolasi terkendali dalam rangka penanganan Covid-19 belum memadai, pengawasan atas fasyankes belum dilaksanakan dan didokumentasikan secara memadai, sistem informasi terkait pengawasan belum komprehensif dan belum dimanfaatkan secara optimal, serta penerapan sanksi administratif belum efektif dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan hidup.

Hal tersebut mengakibatkan hasil pengawasan belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat evaluasi pengelolaan lingkungan hidup.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Kesehatan perlu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) untuk menyusun sistem *monitoring* dan *database* fasyankes terkait perizinannya, pengelolaan limbah B3 medisnya, maupun masa kerja sama pengelolaan limbah medisnya apabila menggunakan jasa pihak ketiga.

BPK juga merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk prosedur operasional standar (POS) sesuai ketentuan terkait dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian terpadu pada fasyankes.

Selain itu, BPK juga mengungkapkan permasalahan yakni Dinkes belum optimal dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (binwasdal) terkait pengelolaan limbah B3 medis pada fasyankes. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan POS atas binwasdal pengelolaan limbah medis belum ditetapkan, binwasdal belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh, binwasdal belum didokumentasikan secara memadai, Dinkes belum optimal dalam mendorong ketaatan rumah sakit untuk penyampaian laporan pengelolaan limbah, serta *monitoring* atas tindak lanjut hasil binwasdal belum dilaksanakan dan belum didokumentasikan secara memadai.

Hal tersebut mengakibatkan hasil binwasdal belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat evaluasi pengelolaan limbah B3 medis.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun POS sesuai ketentuan terkait dengan mekanisme binwasdal terpadu pada fasyankes. ●

BPK UNGKAP MASALAH PENCEGAHAN WABAH PENYAKIT DARI HEWAN

Kementan dapat meningkatkan kesiapan dalam melaksanakan kegiatan mencegah, mendeteksi, serta merespons penyakit zoonosis dan *antimicrobial resistance* yang berasal dari hewan apabila dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Ilustrasi: jcomp-freepik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit pada Manusia yang Berasal dari Hewan yang Berdampak Nasional atau Global Tahun 2020 sampai Triwulan III 2021 pada Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Tujuan pemeriksaan adalah menilai kesiapan Kementerian Pertanian dalam mendukung penguatan kapasitas sistem kesehatan nasional untuk mencegah, mendeteksi, serta merespons penyakit zoonosis dan *antimicrobial resistance* yang berasal dari hewan.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis pada 31 Desember 2021, BPK mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan kegiatan mencegah, mendeteksi, serta merespons penyakit zoonosis dan *antimicrobial resistance* (AMR) yang berasal dari hewan. Hal itu antara lain dalam aspek peran Kementan dalam sistem kesehatan nasional, terdapat kebijakan dan regulasi ditetapkan oleh Menteri Pertanian terkait penyakit zoonosis dan pengendalian AMR. Kementan juga telah menetapkan kebijakan dan regulasi terkait penetapan indikator dan pencapaian kinerja dalam pengendalian penyakit zoonosis.

Dalam aspek tercukupinya kebutuhan dan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana, Kementan telah mengidentifikasi kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM serta kebutuhan sarana dan prasarana dalam pengendalian AMR. Kementan juga telah mengidentifikasi kebutuhan peningkatan SDM, sarana dan prasarana, dan anggaran dalam pengendalian penyakit zoonosis.

Dalam aspek upaya mencegah, mendeteksi, serta merespons penyakit zoonosis dan AMR yang berasal dari hewan, Kementan telah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta melakukan pengkajian dan penelitian terkait resistensi antimikroba. Dalam pengendalian AMR dan *antimicrobial use* (AMU), Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan bekerja sama dengan Food

and Agriculture Organization (FAO) Emergency Centre for Transboundary Animal Disease (ECTAD) Indonesia dan menyusun pedoman dan sosialisasi terkait pengendalian resistensi antimikroba.

Dalam aspek *monitoring* dan evaluasi, terdapat penilaian area teknis penyakit zoonosis dan resistensi antimikroba oleh *Joint External Evaluation* (JEE) dalam pelaksanaan *International Health Regulations* (IHR) pada 2005 secara nasional (tidak hanya khusus pada Kementerian Pertanian) dan terdapat laporan *monitoring* dan evaluasi terkait zoonosis dari Ditjen PKH.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukan masih ada permasalahan yang dapat menghambat kesiapan dalam mendukung penguatan kapasitas sistem kesehatan nasional untuk mencegah, mendeteksi, serta merespons penyakit zoonosis dan *antimicrobial resistance* yang berasal dari hewan. Dalam aspek peran Kementan dalam sistem kesehatan nasional, keterlibatan Kementan dalam Sistem Kesehatan Nasional belum diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012. Selain itu, peraturan pemerintah tentang peningkatan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit belum lengkap dan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan juga belum lengkap didukung dengan peraturan/keputusan Menteri Pertanian

BPK juga menemukan, Menteri Pertanian belum optimal meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional melalui percepatan penerapan Otoritas Veteriner di tingkat nasional, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Menteri Pertanian juga belum menetapkan kebijakan dan regulasi terkait indikator/target pencapaian dalam pengendalian AMR.

Dalam aspek tercukupinya kebutuhan dan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana, Kementan belum optimal dalam meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana untuk kegiatan surveilans pengendalian resistensi antimikroba (PRA). Kementan juga belum optimal dalam mengidentifikasi kebutuhan dana dan belum berkomitmen untuk memenuhi anggaran kegiatan surveilans resistensi antimikroba. Selain itu, Kementan belum optimal dalam peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan respons penyakit zoonosis. Kemudian, Kementan belum optimal dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana maupun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan, pendeteksian dan respons penyakit zoonosis.

Dalam aspek upaya dalam mencegah, mendeteksi, serta merespons penyakit zoonosis dan AMR yang berasal dari hewan, koordinasi dan komunikasi antara Kementan dengan K/L lainnya dan pemerintah daerah serta internal Kementan untuk menilai dan mitigasi risiko kesehatan masyarakat terhadap pengendalian AMR belum optimal. Kementan juga belum optimal dalam menerapkan upaya penguatan sistem kesehatan terkait risiko kesehatan masyarakat dari AMR.

Dalam aspek monitoring dan evaluasi, Kementan belum mengidentifikasi dan mereviu indikator keberhasilan dalam pengendalian resistensi antimikroba sesuai *best practice*. Kementan juga belum menyusun strategi penguatan dalam menghadapi AMR dan belum seluruh penyakit zoonosis yang ditetapkan terdapat strategi penguatan.

BPK menilai, Kementan dapat meningkatkan kesiapan dalam melaksanakan kegiatan mencegah, mendeteksi, serta merespons penyakit zoonosis dan *antimicrobial resistance* yang berasal dari hewan apabila dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertanian agar berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian Pertanian dalam Sistem Kesehatan Nasional dengan pendekatan *one health*. Diperlukan adanya kelembagaan yang terstruktur untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi, mulai dari mengidentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

Menteri Pertanian juga perlu menetapkan Otoritas Veteriner di tingkat Kementerian Pertanian dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penetapan Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Pertanian juga perlu menginstruksikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar menyusun rancangan permentan terkait pengendalian resistensi antimikroba.

Atas temuan simpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Kementerian Pertanian memahami temuan dan simpulan BPK serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. ●

MENGGENJOT PENGEMBANGAN 10 BALI BARU

Akibatnya, strategi yang disusun oleh Kemenparekraf tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mencapai target yang ditetapkan.

Maryanto Eko Hartanto

Sektor pariwisata berkembang menjadi sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian dan penerimaan devisa negara. Hal ini selaras dengan agenda pembangunan prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain percepatan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) yaitu Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran 10 DPP Tahun 2020 sampai Semester I 2021 pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) dan instansi terkait. Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan atas dasar pertimbangan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan pemerintah dalam menunjang pencapaian agenda pembangunan prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya Kemenparekraf antara lain mencantumkan 10 DPP sebagai salah satu *major project* dalam RPJMN dan menetapkan kelembagaan 7 DPP dalam peraturan presiden (perpres) maupun peraturan pemerintah (PP) dalam bentuk Badan Otorita dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kemenparekraf juga telah menyusun target komunikasi pemasaran terpadu pengenalan 10 DPP melalui kegiatan *branding* untuk pasar nusantara dan pasar mancanegara.

Meski begitu, BPK menemukan sejumlah permasalahan terkait program tersebut. BPK mencatat, kelembagaan terkait dengan pengembangan 10 DPP belum seluruhnya terbentuk dan menjalankan fungsinya secara memadai.

Badan Otorita atau KEK Pariwisata belum semua terbentuk dan beroperasi di daerah pariwisata prioritas. Kemenparekraf/Baparekraf juga belum memiliki *database* dan pengembangan sistem informasi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk 10 DPP yang memadai. Pelaku industri maupun SDM pariwisata dan ekonomi kreatif belum memenuhi jumlah dan standar kompetensi nasional. Akibatnya, pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan 10 DPP serta analisis kelemahan, kelebihan, tren, dan potensi pariwisata pada DPP belum dapat dilakukan secara optimal.

Lahan zona otoritatif Badan Pelaksana Otorita (BPO) belum sepenuhnya bersertifikat dan siap untuk dikembangkan. Akibatnya, pengembangan kawasan dan pembangunan di lahan BPO Danau Toba (BPODT), BPO Borobudur (BPOB), dan BPO Labuan Bajo Flores (BPOLBF) belum dapat dilaksanakan atau dimulai.

Kegiatan pemasaran 10 DPP juga belum didukung dengan strategi pemasaran yang memadai antara lain strategi komunikasi terpadu 10 DPP untuk pasar pariwisata nusantara dan mancanegara belum disusun dan ditetapkan berdasarkan *brand measurement* secara memadai. Selain itu, strategi pemasaran 10 DPP untuk pasar pariwisata nusantara dan mancanegara belum disusun dan ditetapkan serta tidak berdasarkan hasil analisis pasar. Akibatnya, strategi yang disusun oleh Kemenparekraf tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mencapai target yang ditetapkan.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar meminta Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur untuk menginstruksikan Direktur Tata Kelola Destinasi supaya lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembentukan BPO.

Menparekraf juga perlu menginstruksikan Direktur Utama dan Direktur Destinasi terkait untuk lebih optimal dalam berkoordinasi dengan K/L terkait antara lain dalam pensertifikatan lahan dan proses tukar menukar kawasan hutan dan pengurusan perizinan berusaha pemanfaatan hutan-jasa lainnya (PBPHJL) untuk pengembangan pariwisata.

Deputi Bidang Pemasaran juga perlu menyusun strategi komunikasi terpadu dan pemasaran untuk pasar nusantara dan mancanegara yang bersifat operasional setiap tahunnya, berdasarkan arah kebijakan bidang pemasaran dengan mempertimbangkan *brand measurement* atau analisis pasar dan laporan dari Visit Indonesia Tourist Officer (VITO) serta di dalamnya terdapat fokus pada pengembangan 10 DPP. ●

Meningkatkan **Imunitas Tubuh**

1. Berjemur setiap hari selama 10-15 menit sebelum jam 9 pagi dan/atau setelah jam 3 sore.

2. Olahraga dengan intensitas ringan/sedang.

3. Konseling *online* dengan psikolog atau dokter kesehatan jiwa apabila cemas dan stres mengganggu.

4. Interaksi virtual dengan keluarga dan teman.

5. Menghindari rokok dan minuman beralkohol.

6. Batasi berita tentang pandemi.

7. Meditasi dan tidur yang cukup.

8. Beraktivitas seperti biasa di ruang isolasi mandiri.

Tunda Olahraga Jika :

1. Sesak napas dengan saturasi oksigen <95% saat istirahat.
2. Demam selama 2 hari terakhir.
3. Nyeri dada, nyeri kepala.
4. Batuk terus menerus.

OPTIMALISASI PEMERIKSAAN JARAK JAUH

Pemeriksa tetap dapat memenuhi standar pemeriksaan dan meminimalkan terjadinya risiko hukum walaupun pemeriksaan dilakukan secara jarak jauh.

Pemeriksaan jarak jauh (PJJ) semakin dibutuhkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memenuhi tantangan perkembangan zaman. Untuk itu, Direktorat Litbang BPK menyusun Panduan Pemeriksaan Jarak Jauh guna menjadi acuan bagi para pemeriksa BPK.

Aji mengatakan, saat ini PJJ semakin digunakan seiring pemanfaatan teknologi informasi (TI). Dengan adanya kemajuan teknologi maka semakin memudahkan komunikasi.

"BPK harus mengikuti perkembangan yang ada," ujar Aji dalam Diseminasi Panduan Pemeriksaan Jarak Jauh yang diselenggarakan secara virtual, Jumat (3/6). Diseminasi Panduan PJJ diselenggarakan oleh subdit Litbang PDTT dengan narasumber antara lain Wahyu Prabowo Aji. Diskusi diseminasi dibuka Eko Setyo Nugroho, Kasubdit Litbang PDTT dan dimoderatori oleh Oktarika Ayoe Sandha.

Selain untuk beradaptasi dengan metode pemeriksaan baru, PJJ juga dilakukan sebagai dampak kondisi kedaruratan pada pekerjaan pemeriksaan. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 membatasi pergerakan pemeriksa sehingga diperlukan prosedur alternatif dalam melaksanakan pemeriksaan.

Aji menekankan, pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh tetap harus mengacu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dengan PJJ pemeriksaan kita juga tetap harus mengacu SPKN. Selain itu, mitigasi risiko juga tetap dilakukan sesuai pilar ketiga pada SPM BPK, yaitu perencanaan dan pertimbangan risiko.

"Dengan latar belakang itu, maka Direktorat Litbang menyusun panduan PJJ," ujar Aji.

Dia mengatakan, panduan PJJ dapat menjadi acuan bagi pemeriksa dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut, kertas kerja, serta pengendalian dan penjaminan mutu. Pemeriksa tetap dapat memenuhi standar pemeriksaan dan meminimalkan terjadinya risiko hukum walaupun pemeriksaan dilakukan secara jarak jauh.

Aji menjelaskan, dalam ISO 19011:2018 Guidelines for Auditing Management Systems disampaikan, PJJ adalah metode yang diperkenalkan untuk membantu pemeriksa menjalankan penugasan ketika mereka tidak dapat hadir secara langsung di lokasi pemeriksaan karena adanya alasan keamanan atau hambatan lain. Pemeriksaan jarak jauh diselenggarakan dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi.

Terdapat sejumlah perbedaan pemeriksaan konvensional dan PJJ. Aji mengungkapkan, dalam tahap diskusi atau konfirmasi dalam pemeriksaan konvensional bisa dilakukan secara tatap muka. Sementara dalam PJJ, pemeriksa akan memanfaatkan media komunikasi dan diperoleh bukti berupa notula, video rekaman, atau tangkapan layar. Begitu juga dengan tahapan wawancara atau klarifikasi kepada entitas.

Dalam tahapan observasi dan pengujian fisik, untuk pemeriksaan konvensional pemeriksa bisa melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan. Kemudian akan dihasilkan bukti foto dan video serta berita acara hasil pengujian fisik.

Untuk PJJ, observasi dan pengujian fisik dilakukan entitas dan disaksikan pemeriksa secara jarak jauh. Bukti foto dan video kemudian diserahkan secara daring. Begitu pula berita acara diterima secara daring dan ditandatangani.

Kemudian, penyampaian temuan pemeriksaan maupun permintaan tanggapan untuk PJJ juga diserahkan dalam bentuk *soft copy*.

Aji mengungkapkan, pelaksanaan PJJ memiliki kelebihan dan kendala. Dia menyampaikan, PJJ dapat menghemat biaya perjalanan dinas dan memperluas cakupan pemeriksaan. Selain itu, PJJ juga mempermudah pelibatan tenaga ahli atau spesialis bidang tertentu.

PJJ juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat dokumentasi dan pelaporan pemeriksaan BPK. Hal ini juga meningkatkan kolaborasi BPK dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Inspektorat bisa membantu uji fisik atau uji kas tapi tetap tanggung jawab hasil pemeriksaan ada di BPK," tegas Aji.

Dalam tahap perencanaan PJJ, Aji mengungkapkan terdapat sejumlah hal yang dapat dilakukan untuk melancarkan penugasan pemeriksaan. Hal itu antara lain pemeriksa dan entitas menyepakati media komunikasi, media proses pemeriksaan, serta media pengiriman data pemeriksaan. Pemeriksa dan entitas juga menyepakati perjanjian menjaga kerahasiaan dokumen atau data. Untuk meningkatkan kelancaran, menurut Aji, hendaknya pemeriksa juga melakukan uji coba perangkat TI terlebih dahulu dan menyiapkan rencana alternatif.

Aji mengatakan, dalam pelaksanaan PJJ diperlukan komunikasi yang baik dengan entitas guna menyampaikan rencana pemeriksaan mulai dari *entry meeting* hingga *exit meeting*. Selain itu, alat bantu pendukung PJJ seperti aplikasi maupun perangkat keras TI baik dari pihak entitas maupun pemeriksa harus sama-sama memadai.

Dalam pedoman PJJ yang disusun Direktorat Litbang, Aji mengungkapkan, telah disertakan tata cara pengujian seperti pengujian kas, pengujian persediaan, dan pengujian fisik belanja modal konstruksi.

Kemudian, dalam tahap pelaporan PJJ, Aji menyampaikan, pemeriksa perlu fokus pada risiko utama. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) jarak jauh fokus pada risiko-risiko utama pemeriksaan dan mengungkapkan pendekatan atau cara baru yang digunakan pemeriksa untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat.

Kemudian, pembahasan temuan pemeriksaan (TP) dapat dilakukan melalui *video conference* dengan menjelaskan TP dan mengirimkan dokumen tersebut kepada entitas untuk ditanggapi. Setelah itu, entitas memberikan tanggapan tertulis dan mengirimkan kembali TP yang telah ditanggapi melalui *document sharing platform* yang disepakati.

"Pemeriksa mendokumentasikan cara baru yang digunakan dalam pemeriksaan dan menyatakan metode pemeriksaan jarak jauh yang digunakan," ujar Aji. ●

RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER

SAI20 MITRA UTAMA G20 PERKUAT AKUNTABILITAS

Semangat negara-negara G20 dalam meminimalkan dampak krisis juga harus ditopang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

■ **Isma Yatun**

Badan Pemeriksa Keuangan menggelar SAI20 *Senior Officials Meeting* (SOM) pada 20-21 Juni 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan kali ini merupakan lanjutan dari SAI20 *Technical Meeting* yang digelar pada Januari 2022 dan bagian dari rangkaian kegiatan mendukung Presidensi G20 2022.

Dalam pembukaan kegiatan, Ketua BPK Isma Yatun mengatakan bahwa dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, ia merasakan antusiasme para perwakilan lembaga audit keuangan, terutama terkait isu-isu prioritas yang perlu diangkat SAI20.

Hal ini menurut Ketua BPK menunjukkan komitmen anggota SAI20. Selain itu, menunjukkan tingginya minat kolaborasi, kontribusi, upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan mempercepat pencapaian SDGs.

"Hasil dari seminar dan dua hari *Senior Official Meeting* SAI20 akan terbukti penting bagi penyusunan komunike G20 kita," papar dia.

Ia menambahkan, pemerintah negara-negara anggota G20 membangun semangat kolektif dan kolaboratif untuk meminimalkan dampak dari *multiple crisis*. Oleh karena itu, semangat ini juga harus ditopang oleh prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. SAI20 dapat menjadi mitra yang berharga bagi pemerintah negara-negara G20 dalam meningkatkan akuntabilitas.

Untuk mencapai upaya pemulihan pasca-Covid-19, SAI dengan mandat masing-masing, telah mengembangkan strategi dan menunjukkan inovasi di masa krisis.

SAI juga merupakan komponen integral untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan publik yang lebih baik dalam mengadopsi pendekatan "*One Health*" yang universal dan inklusif.

Sesuai dengan tema "*Recover Together, Recover Stronger*", G20 perlu meningkatkan *resilience* dan stabilitas keuangan, juga memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Di saat yang sama, anggota G20 wajib menjaga stabilitas keuangan global akibat perubahan iklim. Salah satu caranya adalah dengan mengagendakan pengembangan ekonomi hijau atau berkelanjutan.

Transformasi digital, ungkap Ketua BPK, juga menjadi tantangan lain yang menimbulkan kerentanan dan kesenjangan, khususnya dalam hal infrastruktur digital dan konektivitas di seluruh dunia.

Untuk itu, G20 harus bertindak sebagai katalis untuk menekankan pentingnya aman dan berkelanjutan dalam transformasi digital, khususnya di sektor keuangan. Untuk mendukung inisiatif ini, SAI perlu mengarahkan pemeriksaannya ke area terkait dengan transformasi keuangan digital.

"SAI20 juga harus secara konsisten mengeksplorasi peluang untuk inklusivitas dan kolaborasi untuk mendukung tata kelola yang tangguh dan mencapai agenda 2030," katanya.

Ketua BPK mengatakan, SAI pun secara intensif perlu menggelar dialog dan kerja sama internasional untuk hasilkan metode terbaik untuk memecahkan masalah yang terjadi saat ini. "Terinspirasi pemandangan yang mempesona Labuan Bajo, gagasan tentang "*Recover Together, Recover Stronger*" harus diterjemahkan SAI20 menjadi tindakan kolaboratif. SAI20 harus mempromosikan peran strategis dan fungsi utama menjaga akuntabilitas dalam tata kelola G20. Inisiatif ini adalah bagian dari komitmen bersama untuk membuat perbedaan dalam kehidupan warga negara," ucap dia.

Ia juga berharap *Senior Official Meeting* SAI20 bisa mengesahkan tata tertib yang telah dibahas pada *technical meeting* awal Januari lalu. Pertemuan juga menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut dua isu prioritas untuk menyusun usulan komunike SAI20. "Kami bermaksud untuk membawa draf komunike SAI20 ke KTT SAI20 pada bulan Agustus."

SAI20 SOM dihadiri oleh 12 *Supreme Audit Institutions* (SAI) dimana 6 SAI hadir di Labuan Bajo yaitu SAI Australia, Brazil, India, Indonesia, Rusia dan Saudi Arabia, sementara 6 SAI lainnya hadir secara virtual yaitu SAI Argentina, Cina, Korea, Meksiko, Afrika Selatan dan Turki. SOM bertujuan untuk menyetujui "*Rules of Procedures*" dari SAI20 dan membahas draf komunike yang keduanya akan disahkan di SAI20 *Summit* pada 29-30 Agustus 2022. ●

■ Foto bersama peserta SAI20 SOM.

SAI 20 SENIOR OFFICIALS MEETING HASILKAN DRAF KOMUNIKE

Keputusan rapat menyimpulkan harus ada pengembangan strategi pemeriksaan di masa krisis, sementara di saat yang sama pemerintah wajib menyiapkan upaya pemulihan ekonomi yang cepat.

■ **Isma Yatun**

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun resmi menutup SAI20 *Senior Officials Meeting* (SOM) pada 20-21 Juni 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Isma Yatun menyebut kegiatan yang digelar selama dua hari menghasilkan keputusan mendukung aturan prosedur SAI20 dan menyiapkan draf komunike.

"Partisipasi aktif peserta SAI20 SOM dan semangat menuju kerja sama dan konsensus telah menandai tonggak lain dalam komunitas SAI20," katanya.

Ia menyebut aturan prosedur SAI20 akan menjadi dasar komunikasi kepada seluruh anggota. Sehingga, kedepannya koordinasi dan kerja sama bisa lebih mudah dan lebih baik untuk mencapai tujuan bersama.

SAI20 juga menunjukkan perannya dalam menilai efektivitas program dan kebijakan G20, khususnya dalam dua isu prioritas yaitu pemulihan ekonomi dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. "Proses penyempurnaan draf akan berlanjut setelah SOM melalui diskusi antar anggota," ungkap dia.

Partisipasi aktif peserta SAI20 SOM dan semangat menuju kerja sama dan konsensus telah menandai tonggak lain dalam komunitas SAI20.

Percepatan pemulihan ekonomi menjadi hal mendesak, begitu juga untuk kembali fokus pada SDG's. Percepatan penting untuk mengompensasi kesempatan yang hilang dalam dua setengah tahun terakhir akibat pandemi Covid-19.

Hal ini juga sesuai dengan amanah INTOSAI bahwa setiap elemen dalam masyarakat harus ambil bagian dan berupaya mengatasi kemunduran ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Ia menambahkan, keputusan rapat menyimpulkan harus ada pengembangan strategi pemeriksaan di masa krisis, sementara di saat yang sama pemerintah wajib menyiapkan upaya pemulihan ekonomi yang cepat. Selain itu, mendorong pencapaian Arsitektur Kesehatan Global 2030, pencapaian ekonomi hijau, dan transformasi digital.

Selanjutnya draf juga menyimpulkan lembaga audit bertanggung jawab untuk memastikan pemerintah G20 memberi perhatian terhadap budaya akuntabilitas dan transparansi. Khususnya untuk seluruh upaya pembuatan kebijakan dan pengeluaran pemerintah.

Ketiga, lembaga audit di seluruh dunia wajib memperkuat inklusivitas dan sinergi antara lembaga audit anggota G20 dan non-negara G20.

Ketua BPK menambahkan, draf komunike yang dibahas dalam SAI SOM kali ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dibawa dalam KTT Pemimpin G20. "Pembentukan SAI20 adalah langkah kecil pertama untuk mencapai dampak lebih besar dari keterlibatan lembaga-lembaga audit dalam G20," katanya. ●

TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS TAK BISA DITAWAR

Indonesia menggunakan fiskal dengan cara yang lebih aktif dan strategis untuk memulihkan dampak pandemi Covid-19.

■ **Sri Mulyani**

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, peran *Supreme Audit Institution* (SAI) atau lembaga pemeriksa negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting untuk mengawal pemerintah di masa krisis. Menkeu menyatakan, program pemulihan ekonomi dan kesehatan tidak boleh mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Hal tersebut ditegaskan Menkeu dalam SAI20 Senior Officials Meeting (SOM) pada 20-21 Juni 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan kali ini merupakan lanjutan dari SAI20 Technical Meeting yang digelar pada Januari 2022 dan bagian dari rangkaian kegiatan mendukung Presidensi G20 2022.

Sri Mulyani dalam pembukaan acara tersebut menyatakan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK atas upayanya dalam memprakarsai forum SAI20, khususnya untuk mengakomodasi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas program tersebut, sekaligus menjadi pusat kerja sama SAI yang saling menguntungkan bagi semua negara G20.

Sri Mulyani mengatakan sesuai dengan tema "The Supreme Audit Institution's Contribution to the Acceleration of Global Economic Recovery and the SDGs Agenda 2030", saat ini seluruh negara termasuk anggota G20 dalam jalur pemulihan setelah dua tahun pandemi Covid-19. Selama dua tahun tersebut, pandemi menciptakan dampak yang sangat signifikan bagi ekonomi, kesehatan, serta sosial masyarakat.

Khusus di Indonesia, jumlah kasus telah menurun secara konsisten. Menurut Menkeu, RI memiliki peluang yang sangat kuat bagi pemulihan ekonomi. Apalagi konsumsi dan produksi mulai berjalan seperti sedia kala.

Pemulihan Indonesia masih berada di jalur yang sangat kuat dengan pertumbuhan triwulan I 2022 berada di level 5,01 persen. Hal ini disumbang oleh pemulihan konsumsi, peningkatan investasi, dana ekspor.

Pemulihan ini juga disertai dengan peningkatan lapangan kerja serta penurunan kemiskinan. "Kami telah menciptakan 515 juta pekerjaan hingga Februari 2022, yang kemudian menurunkan tingkat pengangguran," tutur dia.

Menkeu mengatakan, Indonesia menggunakan fiskal dengan cara yang lebih aktif dan strategis. Pada tahun 2020, ketika pendapatan turun lebih dari 18 persen sementara pengeluaran harus meningkat karena masalah kesehatan, sosial, dan juga ekonomi, Indonesia mengalami defisit di atas tiga persen. Tekanan yang begitu kuat mendorong Indonesia mengeluarkan undang-undang khusus atau darurat.

"Undang undang darurat dibuat agar kami dapat memberikan pedoman yang kuat dan pasti bagi kami untuk merancang kebijakan. Respons terhadap pandemi serta proses pemulihan. Undang-undang darurat ini menciptakan lingkungan bagi kita untuk dapat menggunakan alat fiskal, yaitu anggaran kita, untuk menanggapi pandemi yang terus berlanjut, tidak pasti, karena mutasi virus, serta kebutuhan untuk melindungi masyarakat sebagai sekaligus memulihkan perekonomian," tutur dia.

Dalam undang-undang tersebut diizinkan defisit lebih dari 3 persen hanya untuk tiga tahun. Aturan baru ini juga mendorong pemerintah lebih disiplin karena setelah pandemi negara akan menghadapi tantangan lain, yaitu volatilitas ekonomi global akibat inflasi serta pengetatan kebijakan moneter.

Selain itu sejak tahun 2016, salah satu Forum OECD dan Kajian Komunitas Lembaga Pemeriksa Keuangan telah menyepakati perlunya kontribusi yang lebih berharga terhadap siklus kebijakan, proses, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bahkan dalam situasi darurat pandemi yang sangat sulit ini, negara boleh berkompromi dan mengorbankan tata kelola dan akuntabilitas yang baik. "Peran BPK menjadi sangat penting dalam memberikan *assurance* melalui penguatan pengawasan, pengembangan wawasan, dan memberikan pandangan ke depan yang strategis," ucap dia.

Selain itu, rekomendasi yang diberikan BPK terkait pelaksanaan program menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan kebijakan dan operasional. "Terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran serta akuntabilitas."

Menkeu menegaskan, BPK telah memberikan kepastian terkait *governance*, *risk*, *and control* (GRC), khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sangat tidak pasti dan program pemulihan ekonomi nasional.

"Kondisi luar biasa ini, tidak boleh mengorbankan tata pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas," tutur dia.

Oleh karena itu, ujar Menkeu, peran sebuah SAI menjadi sangat sangat penting. Di Indonesia, BPK telah melakukan berbagai kajian dan kajian atau wawasan terhadap beberapa program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat mengenai perlindungan sosial dan kesehatan serta isu desentralisasi asimetris yang sangat penting.

Pendapat dan hasil kajian BPK telah dipertimbangkan dengan sangat serius oleh pemerintah untuk merumuskan dan menyempurnakan kebijakan di bidang perlindungan sosial maupun di bidang desentralisasi. Sehingga mampu memiliki hasil yang efektif dari perlindungan sosial serta peningkatan penerima manfaat yang ditargetkan.

BPK juga telah melakukan tugas yang sangat berat dalam memberikan fungsi wawasan bagi lembaga pemeriksa lainnya. SAI diharapkan melakukan kajian terhadap bidang-bidang terkait penanganan Covid-19 yang belum siap oleh semua negara di dunia karena tantangan yang luar biasa ini, serta program pemulihan ekonomi yang juga sangat rumit.

"Lembaga Pemeriksa Keuangan juga diharapkan mampu menjalankan fungsi kejelian di samping fungsi wawasannya, yang lebih membutuhkan kemampuan untuk meramalkan tren masa depan dan risiko yang mungkin timbul. Ini tentu bukan tugas yang mudah karena ketidakpastian serta volatilitas yang kita hadapi sekarang," ucap dia.

Menurut Menkeu, dinamika dunia akan terus memberikan situasi yang sangat menantang dan dinamis.

SAI diharapkan dapat memberikan masukan terhadap alternatif pilihan kebijakan yang kemudian dapat menciptakan perumusan kebijakan yang lebih baik oleh pemerintah.

Sinergi dan kolaborasi antar institusi ini, dan pada akhirnya, untuk meningkatkan kinerja kebijakan publik di setiap negara sangat sangat penting terutama di masa yang sangat kritis dan penuh tantangan ini.

Lembaga Pemeriksa Keuangan akan memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan di bawah ketidakpastian dengan mengidentifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan tertentu yang diambil saat ini.

Dengan itu, BPK dapat membangun kepercayaan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan dan strategi, yang tidak seharusnya hanya jangka pendek dalam perspektif tetapi juga dalam implikasi jangka panjang.

Penerapan aturan pengawasan, wawasan, dan kejelian BPK diharapkan dapat memberikan dampak yang jauh lebih baik bagi perumusan kebijakan dan kinerja pemerintah.

"Kami berharap Lembaga Pemeriksa Keuangan juga dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap implementasi kebijakan dan rekomendasi perbaikan. Apalagi Dunia akan menghadapi banyak ketidakpastian dan kejutan, termasuk perubahan iklim dan, tentu saja, pandemi serta situasi geopolitik selanjutnya dan selanjutnya," ucap dia.

Menkeu menambahkan, banyak kejutan yang sekarang dihadapi oleh negara-negata di dunia, upaya kita untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan akan mendapat dukungan kritis yang sangat mengerikan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai pada 2030 tentu telah mengalami kemunduran, baik dari pandemi maupun berbagai guncangan lainnya, termasuk saat ini dengan inflasi yang tinggi, serta pengetatan kebijakan moneter dan makro.

Sri menambahkan, SAI telah memberikan kajian dan analisis risiko yang sangat baik terkait SDGs. Sri mengatakan, BPK juga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan penegakan keadilan dalam proses bisnis negara yang sejalan dengan pendekatan tata kelola yang baik, yang merupakan tugas utama SAI.

"Dengan sisa waktu yang jauh lebih sempit, sangat penting bagi kita semua untuk terus berkolaborasi dan bersinergi agar kita dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan," ucap dia.

Dalam forum internasional seperti G20, Indonesia juga memberikan kesempatan untuk membahas bagaimana masing-masing negara dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan semangat kerjasama, kolaborasi, dan konsensus. Wawasan dan kejelian pengawasan aturan lembaga Pemeriksa Keuangan pasti dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya G20 dan komunitas global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menavigasi lingkungan pemulihan ekonomi yang sangat sulit dan menantang, serta efek parut pandemi, "Dan bagaimana kita bisa menavigasi dengan teknologi baru, teknologi digital, yang menjadi *platform* untuk hampir semua aktivitas.

Pendapat dan hasil kajian BPK telah dipertimbangkan dengan sangat serius oleh pemerintah untuk merumuskan dan menyempurnakan kebijakan di bidang perlindungan sosial maupun di bidang desentralisasi.

Ia menyatakan tingkat kematangan BPK di masing-masing negara anggota G20 berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dikembangkan *platform* untuk memperkuat peran SAI sebagai mitra negara anggota G20 dalam merespons isu global.

Peran itu tidak hanya sebagai auditor, tetapi juga dapat berperan sebagai mitra negara dalam menghadapi isu yang sangat global dan lingkungan yang menantang. *Platform* Lembaga Pemeriksa Keuangan 20 (SAI20) dapat membantu mengembangkan ide serta berbagi praktik terbaik tentang bagaimana lembaga pemeriksa dapat menangani tanggap darurat dan proses pemulihan dengan menekankan pada kolaborasi yang efektif antara SAI, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. ●

URGENSI DAN TUJUAN PEMBENTUKAN SAI20

Inisiatif pembentukan *engagement group* baru dalam kerangka G20 ini merupakan wujud peran serta SAI. Khususnya dalam mengatasi berbagai tantangan global untuk pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginisiasi pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20). Inisiasi ini berfokus kepada upaya terciptanya *good and accountable governance* melalui peningkatan peran SAI sebagai mitra strategis pemerintah.

Inisiatif pembentukan *engagement group* baru dalam kerangka G20 ini merupakan wujud peran serta SAI. Khususnya dalam mengatasi berbagai tantangan global untuk pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Sekaligus wujud komitmen dalam mendukung pemerintah membangun *resiliency* dan *sustainability* serta upaya mempercepat pencapaian target-target SDGs.

Output yang diharapkan dan *key deliverables* dari SAI20 yaitu berupa *communiqué* kepada pemimpin negara-negara G20. Isinya yaitu rekomendasi mengenai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi global pasca-Covid-19 dan percepatan pencapaian SDGs Agenda 2030.

Dalam menghasilkan *communiqué* yang menjawab isu-isu prioritas tersebut, SAI20 merencanakan beberapa agenda pertemuan selama periode satu tahun masa Presidensi G20 Indonesia. Dimulai dari Pertemuan Teknis, Senior Officials Meeting, dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Apa saja urgensi dan tujuan dari pembentukan SAI20? Berikut paparannya:

#Urgensi Pembentukan SAI20

Supreme Audit Institution 20 (SAI20) merupakan *engagement group* yang beranggotakan SAI negara anggota G20. Forum ini berfokus terhadap upaya mendorong terciptanya *good and accountable governance* melalui peningkatan peran SAI sebagai mitra strategis pemerintah.

• Sebagai Legasi Bangsa Indonesia

Inisiatif pembentukan *engagement group* dalam kerangka G20 merupakan hak prerogatif (atau sepenuhnya bergantung pada) negara pemegang Presidensi G20. Momentum Presidensi G20 Indonesia 2022 merupakan kesempatan langka yang belum tentu terjadi setidaknya setiap 20 tahun sekali. Sejak forum G20 dibentuk pada 1999, Indonesia akan tercatat sebagai negara tuan rumah penggagas terbentuknya SAI20.

• G20 Merupakan Forum yang Strategis

G20 merupakan forum negara maju dan berkembang dengan perekonomian terbesar. Forum ini merepresentasikan 85% PDB dunia, 80% investasi dunia,

Dalam menghasilkan *communiqué* yang menjawab isu-isu prioritas tersebut, SAI20 merencanakan beberapa agenda pertemuan selama periode satu tahun masa Presidensi G20 Indonesia.

75% perdagangan internasional, dan 2/3 jumlah penduduk dunia. Artinya, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil pemimpin G20 memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia. Terkait dengan itu, SAI20 memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan pemimpin G20 dalam mengambil kebijakan yang lebih baik.

• Dunia Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Pemerintah di berbagai negara berusaha untuk bangkit dan pulih dari krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19. Penanganan dampak pandemi menghabiskan anggaran dana publik dengan jumlah fantastis. Peran SAI sebagai mitra strategis pemerintah, antara lain memastikan penggunaan dana tersebut memberikan perbedaan dan manfaat sebesar-sebesarnya bagi kehidupan warga negara.

Hal ini sesuai dengan INTOSAI P12: The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-"*making a difference to the lives of the citizens*". SAI20 juga menyerukan pentingnya setiap negara memiliki kesiapan menghadapi krisis pada masa mendatang. Ini dilakukan dengan memastikan terciptanya *governance resilience* dan *business sustainability* serta menekankan prinsip inklusivitas dan kolaborasi *multistakeholders*.

Selain itu, sejak 2015 seluruh dunia telah bersusah payah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mewujudkan Agenda 2030. Fokus dan sumber daya pemerintah yang teralihkan untuk menangani dampak pandemi memunculkan risiko hilangnya momentum dan kemajuan pencapaian yang telah diraih dalam SDGs. Sebagai mitra strategis, SAI berperan dalam mendorong, mengawal, dan mengingatkan pemerintah agar *back on track* dalam pencapaian SDGs Agenda 2030.

#Tujuan Pembentukan SAI20

SAI20 merupakan forum informal yang sistem keketuaannya akan berganti sesuai mekanisme pergantian Presidensi G20. SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan SAI negara anggota G20. Tujuan pembentukannya yaitu:

• Berkontribusi kepada Pemimpin G20

SAI20 memberikan kontribusi kepada pemimpin G20 dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

• Forum *Sharing Knowledge*

SAI20 merupakan ajang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antar-SAI anggota negara G20. Terutama dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan pencapaian SDGs.

• Kolaborasi *Multistakeholders*

SAI20 membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20. •

Majalah bulanan Warta Pemeriksa mendapat penghargaan dalam

The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Berlangsung di Jawa Tengah, pemberian penghargaan dilaksanakan pada 25 Maret 2022.

JADI PEMBICARA TAMU, KETUA BPK BERBICARA MENGENAI SAI PMF

Tujuan kegiatan yakni untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran komunitas SAI dan *multistakeholder* mengenai Supreme Audit Institution *Performance Measurement Framework* (SAI PMF).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menjadi pembicara tamu dalam IDI SAI PMF Webinar on Building SAI Capacity through SAI PMF pada 31 Mei 2022. Kegiatan diselenggarakan secara virtual oleh INTOSAI Development Initiative (IDI).

Tujuan kegiatan yakni untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran komunitas SAI dan *multistakeholder* mengenai Supreme Audit Institution *Performance Measurement Framework* (SAI PMF). Target peserta meliputi pimpinan/ketua SAI, lembaga donor, dan organisasi internasional yang terkait.

Webinar dibuka oleh Deputy Director General IDI, Ole Hoem. Dalam sambutannya, Ole Hoem berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan minat SAI untuk menggunakan SAI PMF untuk *self-assessment* organisasi mereka. Sesi webinar juga menjelaskan mengenai SAI PMF oleh tim IDI, Brighton Nyanga, Nila Eka Putri, dan Nino Tsintsadze.

Dipaparkan, SAI PMF merupakan sebuah kerangka evaluasi kinerja SAI yang bersifat holistik dan berbasis bukti dukung. Oleh karena itu, SAI PMF merupakan perangkat penilaian yang penting dalam mengindentifikasi kekuatan dan area peningkatan dalam suatu organisasi. Dijelaskan juga mengenai proses dan pendekatan dalam menggunakan SAI PMF serta pemanfaatan hasil asessmen bagi SAI.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman yang diwakili oleh ketua BPK dan organisasi donor oleh Natalie Bertsch dari SECO. BPK diundang sebagai *guest speaker* karena berpengalaman dan berhasil dalam menerapkan SAI PMF dalam asessmen kinerjanya.

Pada kesempatan ini, Isma Yatun menjelaskan mengenai organisasi dan tata kelola lembaga untuk memberikan pemahaman tentang BPK. Termasuk juga bagaimana BPK mengenal dan mempelajari SAI PMF.

■ **Isma Yatun**

> **SAI PMF merupakan perangkat penilaian yang penting dalam mengindentifikasi kekuatan dan area peningkatan dalam suatu organisasi.**

Pada sesi berbagi pengalaman ini, ketua BPK juga memaparkan bagaimana implementasi SAI PMF menggunakan dua pendekatan. Yaitu, melalui pendekatan *self-assessment* untuk mengetahui kekuatan, kekurangan, dan kebutuhan pengembangan kapasitas BPK. Kemudian pendekatan *peer-review* untuk meyakinkan hasil dari *self-assessment* tersebut. BPK juga menganggap bahwa SAI PMF dapat menjadi *tool* yang bermanfaat dalam menyusun rencana strategis.

Isma Yatun juga menyampaikan faktor-faktor pendukung suksesnya pelaksanaan SAI PMF di BPK. Hal itu antara lain komitmen dan dukungan dari badan dan manajemen, partisipasi aktif dan komunikasi efektif. Kemudian ketersediaan dan kemudahan akses data, kompetensi tim, serta dukungan IDI dan *stakeholders* lainnya. ●

ANAO KUNJUNGI KANTOR PERWAKILAN KALBAR

Kristian Gage memaparkan pelaksanaan *flexible working* di Australia kepada para pejabat struktural dan fungsional.

Australian National Audit Office (ANAO) berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai *strategic audit planning and risk identification*. Khususnya mengidentifikasi dan menilai risiko yang memiliki dampak signifikan dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Kegiatan itu dikemas dalam "Knowledge Transfer Forum (KTF) on Financial Audit: Strategic Audit Planning and Risk Identification for Financial Audit Planning". Program hasil kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut dilaksanakan di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, beberapa waktu lalu.

Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman ANAO. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pemeriksa di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat. Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan KTF ini adalah Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage dan Tri Joko Prakoso dari Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmadi, membuka kegiatan KTF yang dihadiri oleh sebanyak 60 peserta tersebut. Para peserta terdiri dari pemeriksa dan pegawai unit kerja lain di kantor perwakilan.

Kristian Gage pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berbagi pengalaman seputar pelaksanaan *flexible working arrangements* di Australia dan ANAO. Melalui sesi ini, dia memaparkan pelaksanaan *flexible working* di Australia kepada para pejabat struktural dan fungsional. Kemudian saling berdiskusi mengenai kendala, tantangan, dan dampaknya bagi organisasi.

Kegiatan ini merupakan KTF pertama yang dilakukan secara langsung di kantor perwakilan sejak pandemi Covid-19. Selanjutnya, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di beberapa kantor perwakilan BPK lain. Diharapkan pula agar para pegawai BPK memperoleh *lessons learned* dari penerapan *flexible working arrangements* di ANAO dan dapat mengadaptasinya di BPK sesuai dengan kebutuhan. ●

KANTOR PERWAKILAN KALSEL BELAJAR MENGENAI *SKEPTISISME PROFESIONAL*

Skeptisisme profesional diatur di dalam standar umum.

Pegawai Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai skeptisisme profesional. Hal itu diwujudkan dalam "*Knowledge Transfer Forum* (KTF) *on Financial Audit: Application of Professional Skepticism*" yang digelar belum lama ini.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru ini merupakan rangkaian kegiatan dari kerja sama bilateral BPK dan Australian National Audit Office (ANAO) di bidang pemeriksaan keuangan. Tujuannya, untuk dapat memperluas perspektif dan kemampuan para pemeriksa kantor perwakilan terkait dengan pemeriksaan keuangan.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan KTF di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage. Kemudian Basiswanto Wiratama dari Subdit Litbang Pemeriksaan Keuangan.

Acara yang dihadiri oleh 105 peserta ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ali Asyhar. Para peserta terdiri dari pemeriksa, CPNS, dan pegawai unit kerja lain di kantor perwakilan. Ali Asyhar pun menyambut hangat Kristian Gage dan berterima kasih atas kesediaannya berkunjung ke Banjarbaru.

Pada paparan pertama, Basiswanto menyampaikan mengenai pengaturan *professional skepticism* dalam SPKN. Dalam paparannya, Basiswanto menyampaikan bahwa skeptisisme profesional diatur di dalam standar umum.

Ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional harus diterapkan dalam seluruh tahapan audit. Karena standar umum merupakan landasan utama standar pelaksanaan dan pelaporan.

Selanjutnya, Kristian Gage berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan skeptisisme profesional di ANAO. Dia juga memaparkan mengenai bagaimana melatih sikap skeptisisme profesional dalam pemeriksaan yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Dalam kesempatan itu, Kristian Gage juga memanfaatkan sesi tambahan untuk dapat berbagi pengalaman seputar pelaksanaan *flexible working arrangements* di Australia dan ANAO. Dia menjelaskan mengenai kendala, tantangan, dan dampaknya bagi organisasi. ●

LAKUKAN TATAP MUKA, ANAO BAHAS CORPU, *QA REVIEW*, DAN *GENDER POLICY*

Delegasi ANAO juga mengikuti *office tour* untuk melihat semua fasilitas dan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di Badiklat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid-19.

Pada kesempatan ini, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berdiskusi dengan BPK mengenai berbagai hal. Mulai dari Corporate University, *quality assurance review*, dan *gender policy*.

Pada agenda kunjungan hari pertama, Kamis 23 Juni 2022, Jane Meade didampingi oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage melakukan pertemuan dengan Badiklat PKN. Mereka mempelajari mengenai BPK Corporate University (CorpU). Pada kesempatan ini, delegasi dari ANAO disambut oleh Plt Kepala Badiklat PKN Dwi Setiawan Susanto yang turut didampingi oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN Juska Meidy Enyke Sjam.

Dwi Setiawan dalam paparannya menjelaskan mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Badiklat PKN BPK. Badiklat, menurutnya, telah bertransformasi dari tempat pendidikan dan pelatihan pegawai pada 1996 hingga menjadi The Excellence Learning Center (ELC) pada 2015. Kemudian akhirnya menjadi BPK Corporate University (CorpU) pada 2021.

"BPK CorpU dibangun tidak hanya sebagai strategi pembelajaran. Akan tetapi juga sebagai budaya organisasi BPK yang diarahkan untuk menyatukan proses bekerja, belajar, dan berbagi," kata dia.

Delegasi ANAO juga mengikuti *office tour* untuk melihat semua fasilitas dan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di Badiklat. Jane Meade pun mengaku terkesan dengan kelengkapan fasilitas ruang akademik. Dia juga menyampaikan kekagumannya atas kelengkapan fasilitas pendukung, seperti sarana olahraga dan rekreasi.

"Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar," kata dia.

Kemudian pada 24 Juni 2022, pertemuan bilateral kedua SAI dilanjutkan di kantor pusat. Terdapat dua sesi diskusi, yaitu "*quality assurance review on financial audit report of International Atomic Energy Agency* (IAEA)" dengan tim reviu Inspektorat Utama pada sesi pagi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai "*gender policy-women in leadership*" dengan pejabat Biro SDM dan pegawai terkait pada sesi siang.

Pertemuan *quality assurance review* dilakukan dengan tim reviu Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektur Utama I Nyoman Wara yang didampingi oleh pejabat Inspektorat Penjaminan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP), yaitu Kepala Bidang PKMP I, Satrio Hadi Nugroho. Kemudian pemeriksa madya AKN III, Siti Zubaidah yang bertindak sebagai pengendali teknis tim reviu LK IAEA dan tim reviu atas LK IAEA yang dipimpin oleh ketua tim Hendri Syukri.

Dalam sambutannya, Nyoman Wara menyampaikan apresiasi kepada ANAO atas kesediaan-

nya menjadi mitra yang secara konsisten dan terus menerus memberikan dukungan. Khususnya dalam pengembangan dan peningkatan penjaminan mutu hasil pemeriksaan di BPK. Hal ini pun sejalan dengan permintaan sekretaris jenderal BPK untuk memastikan audit LK IAEA periode 2015-2021 telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

"Selain itu, diharapkan juga diperoleh *lesson learned* selama proses pemeriksaan untuk selanjutnya akan menjadi materi *handover* kepada auditor eksternal IAEA berikutnya, yaitu SAI India," kata Nyoman Wara.

Dia pun berharap ANAO dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan reviu Itama atas pemeriksaan IAEA. Dengan begitu, reviu dan penjaminan mutu atas pelaksanaan audit atas LK IAEA dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan selama menjadi eksternal auditor IAEA selama enam tahun.

Pada kesempatan itu, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK. Khususnya tim Itama yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan sebagai *reviewer* pemeriksaan laporan keuangan lembaga PBB. Apalagi mengingat ANAO belum pernah memiliki pengalaman tersebut.

Meskipun begitu, kata dia, dalam melakukan reviu proses pemeriksaan ANAO juga menggunakan standar pemeriksaan internasional. ANAO memakai standar akuntansi internasional yang sama yang diadopsi oleh berbagai lembaga internasional. Termasuk organisasi internasional di bawah PBB yang mengacu kepada ISSAI 140 tentang quality control of SAIs yang diterbitkan oleh INTOSAI.

Jane Meade juga memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik yang dilakukan di ANAO terkait penilaian elemen tanggung jawab kepemimpinan atas kualitas pemeriksaan dalam berbagai level dan tingkatan tanggung jawab. Termasuk mengaitkannya dengan penilaian kinerja individu dari pemeriksa yang terlibat. Kemudian penyampaian hasil QA kepada publik yang disampaikan melalui *website* ANAO yang bisa diakses oleh publik secara transparan dan lengkap.

Pada pertemuan kedua, ANAO berkesempatan berdiskusi dengan BPK topik "*gender policy-women in leadership*". Diskusi soal gender melibatkan juga kepala bagian dan kasubbag dari

Biro SDM. Termasuk peserta *training* "*Inclusive and Transformative Leadership*" dan *mentees* "*Women in Leadership Mentoring*".

Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Jabatan Fungsional Telviani Savitri menyampaikan mengenai kebijakan terkait *gender policy* di BPK. Dia menjelaskan mengenai komposisi pegawai BPK yang cukup seimbang antara pria dan wanita. Baik dari segi jumlah, jabatan (auditor dan nonauditor), tingkat pendidikan, maupun jenjang jabatan.

Namun demikian, lanjutnya, celah yang cukup besar terlihat dari komposisi level manajerial (struktural). Penerapan *gender policy* di BPK dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah dan kebijakan internal BPK.

"Secara umum, *gender policy* di BPK mengedepankan prinsip sistem merit, mengakomodasi penyandang disabilitas, dan mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia yang efektif," ungkap dia.

Pada kesempatan itu, Jane Meade berbagi pengalaman penerapan *gender policy* di lembaganya. Dia katakan, ada beberapa cara ANAO menerapkan *gender policy*.

Pertama, melalui *Diversity Contact Officer Committee*. Ini merupakan pegawai-pegawai yang telah dilatih untuk dapat membantu pegawai lain dalam masalah yang terkait pekerjaan. Seperti diskriminasi, pelecehan, serta memberi masukan kepada ANAO terkait kebijakan dan layanan *gender policy*.

Kedua, adanya Diversity and Inclusion Strategy 2021-2023. Ketiga, penerapan *Employee Assistance Program* (EAP), yaitu layanan konseling bagi pegawai dan keluarga.

"Dampak positif kesetaraan gender di tempat kerja antara lain adalah lingkungan kerja yang saling menghormati dan lebih aman. Kemudian peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan serta peningkatan inovasi dan produktivitas," ungkap dia. ●

www.bpk.go.id

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

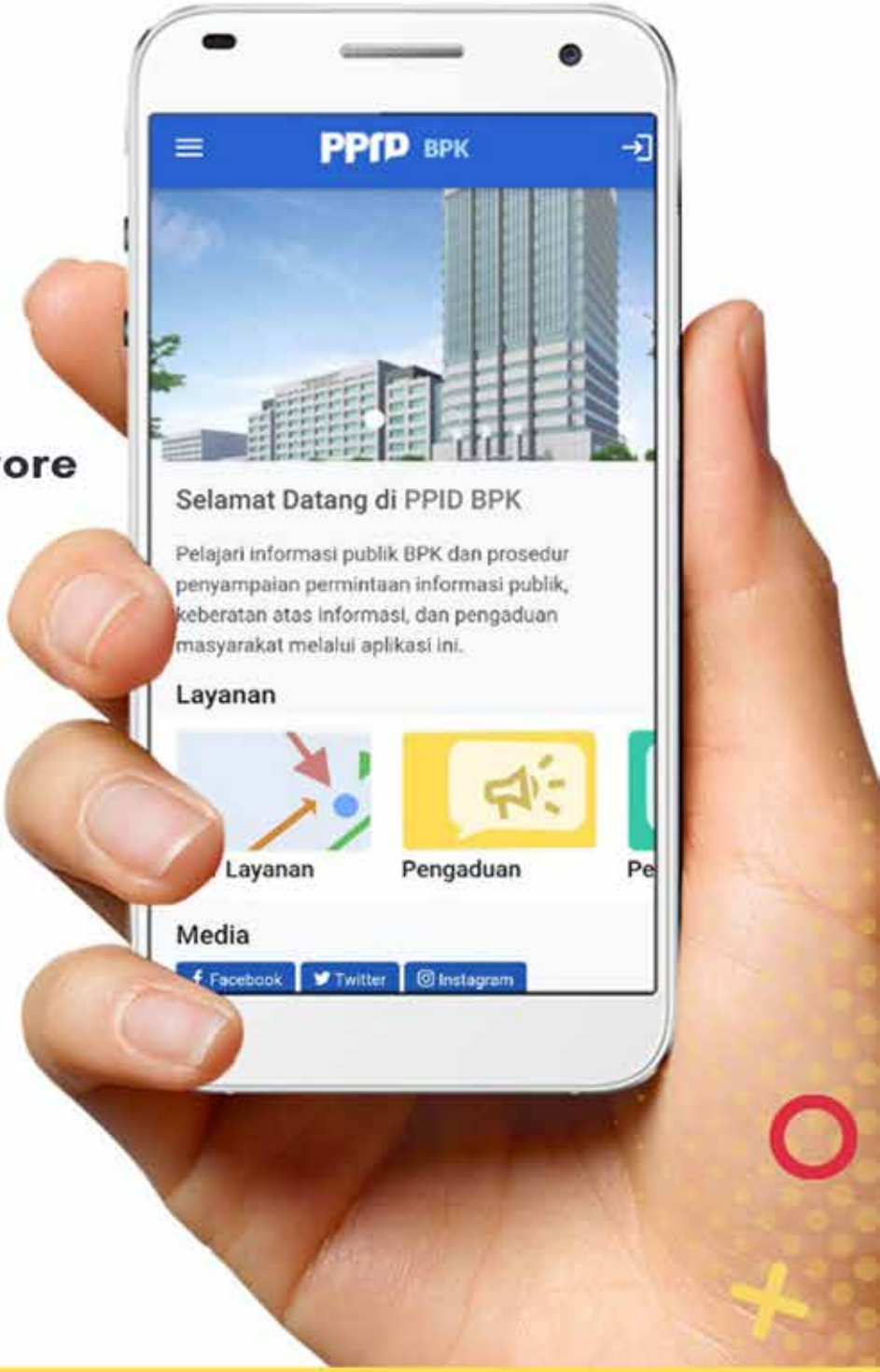

Segera Unduh di Playstore

BPKawan!!

NANY LESTARI, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL

MENGUBAH *MINDSET* MASYARAKAT JADI TANTANGAN UTAMA PENGELOLAAN SAMPAH

■ **Nany Lestari**

Ada banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam membenahi persoalan sampah. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Nany Lestari, salah satu tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reuse*, *reduce*, *recycle*) dari sumbernya, yaitu rumah tangga.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Nany menjelaskan secara detail program-program yang dijalankan Dinas LH Kota Tegal terkait pengelolaan lingkungan hidup beserta target yang ingin dicapai. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Pemerintah Kota Tegal melihat kondisi lingkungan di Tegal saat ini? Apa saja yang dianggap masih perlu perbaikan dan bagaimana upaya pemda dalam melakukan upaya perbaikan tersebut?

Menurut Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tegal tahun 2021, ada empat isu prioritas beserta upaya yang dilakukan. Pertama mengenai ruang terbuka hijau. Jumlah RTH publik masih belum terpenuhi, yaitu masih sebesar 11,59 persen atau belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Tegal No 1 Tahun 2021 tentang Rencana Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2021-2031.

Terkait hal itu, Pemkot Tegal melakukan beberapa upaya, antara lain, melakukan inventarisasi data lahan milik Pemerintah Kota Tegal yang belum termanfaatkan. Kemudian, mempertahankan fungsi dan RTH yang sudah ada, hingga mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Isu prioritas kedua soal kualitas Air. Masalah utama sumber daya air adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah dari aktivitas masyarakat, yaitu industri dan rumah tangga. Berdasarkan sumbangan beban pencemar terhadap kualitas air khususnya air sungai, aktivitas pemukiman menghasilkan limbah domestik dan memberikan pencemaran yang paling tinggi. Kondisi air di Kota Tegal telah dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup dan hasilnya menunjukan pada beberapa sungai telah terjadi pencemaran dengan parameter yang melebihi baku mutu kualitas air sungai, yaitu TDS (*Total Dissolved Solid*), DO (*Dissolved Oxygen*), BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), *Phosphat*, Tembaga, Seng, Klorin, *Fecal Coliform*, dan *Total Coliform*. Menurut pengamatan secara organoleptik, juga tampak beberapa sampah yang mencemari sungai.

Isu prioritas selanjutnya adalah mengenai banjir dan rob. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tegal tahun 2021, sepanjang tahun 2020 terjadi 49 kali bencana banjir. Untuk Daerah yang paling sering terjadi rob adalah Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Timur dengan ketinggian air 5-70 cm. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi topografi Kota Tegal yang merupakan dataran rendah dan terletak di pesisir laut Jawa. Banjir atau genangan di Kota Tegal disebabkan oleh luapan sungai Kemiri dan berkurangnya area resapan air.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal adalah mengoptimalkan kolam retensi Mintaragen dan Tegalsari serta Polder Bayeman.

Adapun isu keempat yaitu persampahan. Jumlah timbulan sampah Kota Tegal pada tahun 2021 adalah sebesar 79.049 ton dengan pengurangan sampah sebesar 19.283 ton. Penyebab belum optimalnya pengelolaan persampahan di Kota Tegal adalah belum adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) permanen, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang tidak terkelola dengan baik serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi Gerakan 3R, pembentukan Bank Sampah di tiap RW, meningkatkan kinerja TPS/TPST/TPS3R, serta pembangunan TPA.

Apa masalah terbesar yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan sampah dan lingkungan di Tegal?

> **Perubahan pola pikir dan perilaku yang diharapkan adalah masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah dari hulu (rumah tangga), melakukan pengelolaan sampah secara 3R dari sumbernya (rumah tangga) dan membuang sampah di TPS yang disediakan Pemerintah Kota Tegal.**

Masalah terbesar yang dihadapi Pemerintah Kota Tegal adalah sulitnya mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat tentang pengelolaan sampah 3R dari sumbernya (rumah tangga). Masalah lain yang dihadapi adalah Kota Tegal belum memiliki TPA sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

Memang, tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Perubahan pola pikir dan perilaku yang diharapkan adalah masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah dari hulu (rumah tangga), melakukan pengelolaan sampah secara 3R dari sumbernya (rumah tangga) dan membuang sampah di TPS yang disediakan Pemerintah Kota Tegal.

Tapi, kita juga menghadapi kendala mengenai keterbatasan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, terutama penyediaan TPA. Perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat juga membutuhkan waktu yang lama, tidak langsung terbentuk setelah satu atau dua kali menerima sosialisasi. Sehingga kita perlu memberikan sosialisasi secara berkelanjutan.

Lalu, program atau inovasi apa saja yang telah dilakukan terkait pengelolaan sampah dan lingkungan?

Inovasi yang telah dilakukan, antara lain, pengelolaan sampah organik dan anorganik di Bank Sampah, pengelolaan sampah organik menjadi kompos di TPST, pengelolaan sampah organik menjadi Briket dengan menggunakan mesin

Predator di TPS3R, budi daya maggot yang makanannya memanfaatkan sampah organik, dan bekerja sama dengan komunitas Rutela (Runtah Tegal Laka-laka) dalam pelatihan pembuatan kerajinan yang memanfaatkan sampah anorganik.

Adapun terkait limbah medis, sudah ada Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis. Kami juga membentuk depo LB3 Medis, dan menyediakan kendaraan roda tiga pengangkut limbah B3 dari fasyankes ke depo.

Seperti apa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan?

Kami melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, manajemen Bank Sampah, Pengelolaan Sampah dengan 3R sudah terus menerus kita lakukan dengan masyarakat baik di tingkat kelurahan maupun RT/RW melalui pertemuan yang dilakukan oleh Bank Sampah, Dasa Wisma, PKK, LPMK, dan Karang Taruna. Pemerintah Kota Tegal juga mengadakan Pelatihan Pengelolaan Sampah yang diwakili oleh masing-masing kelurahan se-kota tegal (unsur PKK, Dasa Wisma, karang taruna) setiap tahunnya.

Selain itu, mengadakan bimbingan teknis (bimtek) untuk mensosialisasikan pengelolaan dan perijinan Limbah B3 untuk pelaku usaha dan fasyankes penghasil Limbah B3. Kemudian, rutin menyelenggarakan Peringatan HPSN (Hari Peduli Sampah Nasional) dan Hari Lingkungan Hidup untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

BPK telah melakukan pemeriksaan dan menyampaikan masalah serta rekomendasi terkait dengan pengelolaan lingkungan di wilayah Tegal. Bagaimana tanggapan Anda terkait pemeriksaan tersebut? Upaya apa saja yang dilakukan untuk menjalankan rekomendasi yang disampaikan BPK?

Pemerintah Kota Tegal berterima kasih atas kesediaan BPK melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan sampah, sehingga Pemerintah Kota Tegal mendapatkan masukan-masukan dan saran untuk perbaikan kedepannya. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan masukan-masukan dan saran yang telah direkomendasikan oleh BPK atas temuan di Pemerintah Kota Tegal.

Upaya itu, antara lain, melakukan penambahan bank sampah/pembentukan bank sampah baru pada OPD dan tingkat RT/RW. Pemenuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan tempat sampah terpilah pada fasilitas umum. Sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai pemilahan sampah dari sumbernya. Pemberian insentif dan disinsentif pada masyarakat yang dapat mengurangi sampah dari hulu ke hilir

Kemudian, melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan terhadap pengelolaan sampah dengan melibatkan kecamatan/kelurahan. Berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk menyediakan tempat sampah terpilah dan pewadahan komunal serta fasilitas pengolahan sampah organik di tingkat pasar. Menyusun peraturan-peraturan baik (perwalkot, perda maupun Surat Edaran Walikota) terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Tegal.

Target apa yang ingin dicapai Pemkot Tegal terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan?

Pemerintah Kota Tegal mempunyai target-target yang ingin dicapai mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain, target pengurangan dan penanganan sampah seperti yang ditetapkan dalam Jakstrada. Kedua, peningkatan pengelolaan limbah B3 dari industri dan fasyankes. Pengurangan pencemaran air limbah. Penurunan emisi pencemaran udara, peningkatan IKA (Indeks Kualitas Air) Permukaan, dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) seperti yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tegal tahun 2019-2024

Kami juga menargetkan penambahan bank sampah setiap tahun di tingkat RW. Hal yang tak kalah penting adalah kami menargetkan tumbuhnya komunitas-komunitas pengelola sampah yang mengelola sampah menjadi produk bernilai ekonomis. ●

ASEP KUSWANTO, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP (LH) DKI JAKARTA

DKI BANGUN PLTSA HINGGA *E-WASTE* UNTUK KELOLA SAMPAH

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu prioritas lingkungan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus dilakukan perbaikan. Berdasarkan data per 2020, timbulan sampah di Ibu Kota Jakarta mencapai mencapai 8.369 ton/hari. Lalu, bagaimana inovasi yang dilakukan Pemprov DKI untuk meningkatkan pengelolaan sampah? Berikut petikan wawancara *Warta Pemeriksa* dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto.

■ Asep Kuswanto

Bagaimana Anda melihat kondisi lingkungan di DKI Jakarta saat ini? Hal apa saja yang dianggap masih perlu perbaikan dan bagaimana upaya pemda dalam melakukan upaya perbaikan tersebut?

Kondisi lingkungan di DKI Jakarta menunjukkan adanya perbaikan kualitas lingkungan yang terus menerus semakin membaik. Hal ini didasarkan pada nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DKI Jakarta cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Namun, peningkatan nilai IKLH tersebut tidak serta merta menjadikan pemerintah provinsi DKI Jakarta berhenti berupaya dalam perbaikan lingkungan. Seperti yang diketahui bersama bahwa Jakarta masih menghadapi tantangan terkait isu-isu lingkungan yang dinamis dan terus berkembang. Beberapa isu prioritas lingkungan yang perlu dilakukan perbaikan, diantaranya bencana banjir, kerawanan air bersih, pengelolaan sampah belum optimal, pencemaran udara, serta minim daerah resapan air dan ruang terbuka hijau (RTH).

Terkait pengelolaan sampah yang belum optimal, hal apa saja yang menjadi penyebab dan bagaimana upaya Pemprov DKI untuk mengatasinya?

Pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta tentu berdampak pula pada banyaknya sampah hasil kegiatan masyarakat yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta memiliki rentang mulai dari 0,63 persen-2,69 persen pada beberapa kota madya dan kabupaten. Peningkatan jumlah penduduk secara langsung juga meningkatkan jumlah timbulan sampah di DKI Jakarta. Menurut Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, setiap orang menghasilkan sampah seberat 0,7 kg/orang/hari. Timbulan sampah paling banyak berasal dari Kotamadya Jakarta Timur, diikuti oleh Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Hal ini berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk yang berada pada masing-masing daerah tersebut.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, timbulan sampah warga DKI Jakarta pada 2020 mencapai 8.369 ton/

> **Menurut Penelitian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, setiap orang menghasilkan sampah seberat 0,7 kg/orang/hari. Timbulan sampah paling banyak berasal dari Kotamadya Jakarta Timur, diikuti oleh Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu.**

hari, dimana sebagian besar sampah tersebut diangkut menuju TPST Bantargebang, dengan kapasitas sebesar 21.878.000 m3. Untuk saat ini DKI Jakarta memiliki kurang lebih sebanyak 1.008 TPS yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dimana 35 persen di antaranya berada di wilayah Jakarta Timur, menjadikannya wilayah dengan jumlah TPS paling banyak. Jumlah ini didominasi oleh TPS jenis *pool* gerobak dengan jumlah mencapai 125 TPS atau 60 persen dari keseluruhan TPS di Jakarta Timur.

Jumlah TPS terbanyak selanjutnya berada di Jakarta Barat berjumlah 236 TPS yang didominasi TPS jenis biasa sebanyak 116 TPS. Selain TPS, Provinsi DKI Jakarta memiliki 2.709 bank sampah sebagai upaya reduksi sampah. Untuk mengatasi hal tersebut, dikeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di dalam Kota atau Intermediate Treatment Facilities (ITF). PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebagai salah satu BUMD milik Provinsi DKI Jakarta akan mengerjakan proyek pembangunan ITF di beberapa tempat melalui kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Ada beberapa upaya pengendalian sampah yang dilakukan. Pertama, pengelolaan sampah lingkup RW. Kami melakukan pengawasan dalam penyediaan kantong belanja ramah lingkungan (KBRL) pada pusat perbelanjaan yang dilakukan secara terkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) yang dilaksanakan pada 20 pusat perbelanjaan di wilayah DKI Jakarta, dengan jumlah pelaku atau *tenant* yang diawasi berjumlah 709 unit. Dari hasil pengawasan tersebut, ketaatan penggunaan KBRL pada pusat perbelanjaan sekitar 90,83 persen dan ketaatan terhadap pelaksanaan penggunaan KBRL untuk pengunjung sebesar 77,15 persen.

Kemudian, kami melakukan pengelolaan sampah kawasan secara mandiri yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan. Selain itu, optimalisasi TPST Bantargerbang dengan metode *landfill mining*. *Landfill mining* adalah penambangan lahan urug zona tidak aktif dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali, sehingga memperpanjang masa pelayanan TPST bantargebang dengan harapan dapat difungsikan untuk tujuan lingkungan lainnya.

Inovasi apa saja yang dilakukan Pemprov DKI dalam hal pengelolaan sampah?

Ada sejumlah inovasi yang kami lakukan terkait pengelolaan sampah di hilir (TPST Bantargebang). Pertama, pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), yaitu fasilitas yang mengolah sampah dengan kapasitas 100 ton/hari serta menghasilkan listrik sekitar 700 kWh. PLTSa merupakan buah kerja sama/kolaborasi antara BPPT (pembangunan) dan DLH Pemprov DKI Jakarta (pengoperasian dan pemeliharaan).

Kemudian, *landfill mining* TPST Bantargebang, yaitu mengekskavasi sampah lama dari zona *landfill* tidak aktif, untuk selanjutnya sampah diolah secara mekanis menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). DLH telah melakukan *pilot project landfill mining* sejak tahun 2020 dengan kapasitas 100-150 ton/hari serta bekerja sama dengan industri semen, yaitu PT Indocement dan PT Solusi Bangun Indonesia untuk pemanfaatan RDF hasil *landfill mining*.

Pembangunan fasilitas pengolahan sampah *landfill mining* dan RDF Plant dengan metode rancang dan bangun. Pada tahun 2022 ini, DLH tengah melaksanakan pembangunan fasilitas yang dapat mengolah 1.000 ton/hari sampah lama dan 1.000 ton/hari sampah baru di TPST Bantargebang. Kedua fasilitas tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2022 dan siap beroperasi pada awal 2023. Fasilitas ini akan mengolah sampah lama dan sampah baru menjadi RDF (minimum 700 ton/hari). RDF selanjutnya akan dimanfaatkan oleh industri semen sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara

DKI juga melakukan inovasi pengelolaan sampah elektronik. Terkait hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi warga Jakarta yang ingin membuang sampah elektroniknya agar tidak dibuang sembarang yang berakibat pencemaran lingkungan. DLH menyediakan layanan Permohonan Penjemputan *E-waste* dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu pada link website Dinas Lingkungan Hidup *https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/layanan_kami/e_waste*.

Penjemputan *E-waste* diperuntukkan hanya kepada rumah tangga perorangan yang memiliki E-waste minimal 5 kg dan bukan untuk institusi dan kawasan komersial. Adapun jenis *E-waste* yang diangkut seperti barang elektronik bekas, yaitu TV, HP, kulkas, mesin cuci, kipas angin, AC, dan sejenisnya. Selain itu, Dinas LH juga menyediakan *dropbox e-waste* (untuk wadah pengumpulan *e-waste* jenis ukuran kecil seperti hp, charger hp, kabel hp, dan lainnya yang tempatkan di beberapa lokasi Halte Transjakarta dan Kantor Pemerintahan lainnya (Walikota dan Balaikota)

Apa tantangan dan kendala yang dihadapi pemda terkait dengan pemeliharaan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah?

Sebagai informasi, ada sejumlah target Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah (Jakstrada) yang tertuang di dalam Pergub No.108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dengan target dari tahun 2018 hingga 2025. Pertama, yaitu target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 30 persen dari angka timbulan sampah dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.

Kemudian, target penanganan sampah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebesar 70 persen dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, maka 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus melaksanakan strategi dan program atau kegiatan yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategi Pengelolaan Persampahan Tahun 2023 – 2026, Peraturan Gubernur No. 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Persampahan dan Peraturan Gubernur No.96 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 sampai tahun 2022. Saat ini capaian pengelolaan sampah Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2021 untuk pengurangan sampah sebesar 24,45 persen dan penanganan sampah 74,74 persen dengan persentase sampah yang dikelola sebanyak 99,18 persen. Indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam pengelolaan sampah pada kebijakan tersebut menjadi tantangan besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengatur kelembagaan dan yang sudah terbentuk yaitu Bidang Pengelola Sampah di tingkat RW dan Badan Layanan Usaha Daerah Pengelola Sampah yang akan mengelola semua perusahaan di DKI Jakarta dalam pengangkutan dan pengolahan sampah termasuk jasa pengangkutan dan jasa pengolahan sampah sebagai penyedia jasa dalam bidang kebersihan. Lembaga tersebut masih belum berjalan secara menyeluruh dan tersistem. Juga membutuhkan SDM yang berkualitas dan andal dalam mengelola sampah sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, baik secara struktural maupun pelibatan dunia akademis dalam memutuskan dan membuat kebijakan. Keseriusan ini dibuktikan dengan adanya *review* dan evaluasi dari semua sistem kelembagaan yang sudah dijalankan.

> **Dukungan masyarakat dibutuhkan untuk mengelola sampah dari sumber namun perlu diberikan insentif dan *reward* sehingga mendorong masyarakat berperilaku dan berbudaya dalam menjaga lingkungan dan taat terhadap peraturan.**

Tantangan lainnya berkaitan dengan peran serta masyarakat. Peran masyarakat secara nyata sudah dibuktikan dengan adanya keterlibatan warga masyarakat, swasta, atau lainnya di tiap RW DKI Jakarta untuk membentuk bank sampah sebagai sarana pengumpulan sampah yang mudah didaur ulang. Namun proses bisnisnya belum jelas, sehingga membutuhkan dukungan pelaku industri daur ulang agar dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat dan nilai sampah yang diolah bernilai tinggi.

Dukungan masyarakat dibutuhkan untuk mengelola sampah dari sumber namun perlu diberikan insentif dan *reward* sehingga mendorong masyarakat berperilaku dan berbudaya dalam menjaga lingkungan dan taat terhadap peraturan, namun dalam meningkatkan peran serta masyarakat sudah terbangun wadah Kolaborator Kajian/Studi Berskala Besar Bidang Persampahan sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat yaitu di *website https://ksbbpersampahan.com*. Untuk meningkatkan peran tersebut perlu ada pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan jelas dalam hal ini *punishment* (sanksi yang diberlakukan sesuai peraturan) diterapkan dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Adapun tantangan dalam pengelolaan sampah di hilir (TPST Bantargebang) yaitu besarnya tonase sampah yang setiap hari diangkut ke TPST Bantargebang serta ketinggian timbunan sampah di TPST Bantargebang telah mencapai sekitar 50 meter. Sebagai langkah menghadapi tantangan tersebut, DLH tengah membangun fasilitas pengolahan sampah *landfill mining* dan RDF Plant yang akan mereduksi 1.000 ton/hari sampah lama dan 1.000 ton/hari sampah baru dari Kota Jakarta. Dengan demikian, diharapkan masa pelayanan TPST Bantargebang dapat diperpanjang untuk melayani pengelolaan sampah dari Kota Jakarta.

BPK sebelumnya melakukan pemeriksaan terkait pencemaran udara dari transportasi darat dan menyampaikan rekomendasi terkait hal tersebut. Bagaimana tanggapan pemda terkait dengan pemeriksaan tersebut? Upaya apa saja yang dilakukan untuk menjalankan rekomendasi yang disampaikan BPK?

Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk menjalankan rekomendasi yaitu dengan membuat *Grand Design* Pengendalian Pencemaran Udara pada tahun 2021 dan pada saat ini sedang dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara yang menjadi salah satu rencana aksi di dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 71 Pengendalian Pencemaran Udara.

Terkait dengan rekomendasi untuk memasukkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target penurunan pencemaran udara yang terukur pada masing-masing OPD yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kualitas udara, saat ini Dinas Lingkungan Hidup sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara dimana didalam ranpergub tersebut akan terdapat rencana dan strategi aksi dari masing-masing OPD terkait dengan target penurunan emisi berdasarkan jenis pencemar. Proses saat ini masih dalam tahap konfirmasi data kepada masing-masing OPD dan akan dilakukan pembahasan lanjutan.

Terkait dengan rekomendasi untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para pihak di luar Pemprov DKI Jakarta, termasuk daerah penyangga, untuk penyusunan dan implementasi strategi dan rencana aksi peningkatan kualitas udara secara simultan di DKI Jakarta, saat ini telah disusun Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota Bekasi. ●

Mengikuti perkembangan di masyarakat, *Warta Pemeriksa* kini sepenuhnya menggunakan platform digital. Pembaca dapat menikmati informasi yang kami sajikan melalui *Warta Pemeriksa Digital*. Kami juga tetap menawarkan pengalaman membaca majalah dalam format *e-magazine* yang dapat diakses dari laman resmi BPK dan *Warta Pemeriksa*.

Foto-foto: iced.cag.gov.in

MENGENAL LEBIH DEKAT ICED, PUSAT PELATIHAN AUDIT LINGKUNGAN DAN SDGS DI INDIA

Fasilitas dan lingkungan di iCED juga dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sebesar 85 persen dari total luas lahan iCED merupakan zona hijau dengan aneka ragam flora dan fauna.

Isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian utama *supreme audit institutions* (SAI) atau lembaga pemeriksa di dunia. Selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI), SAI lainnya yang juga memiliki perhatian terhadap permasalahan lingkungan adalah SAI India, yaitu the Comptroller and Auditor General of India (CAG).

Bentuk keseriusan CAG terkait lingkungan tercermin dengan didirikannya International Centre for Environment Audit and Sustainable Development (iCED). ADAI & Director General iCED Sayantani Jafa menjelaskan, iCED dibentuk CAG of India untuk pengembangan kapasitas berbagi pengetahuan di bidang pemeriksaan lingkungan.

Dia mengatakan, iCED didesain sebagai Global Training Facility (GTF) atau fasilitas pelatihan global dari Working Group on Environmental Audit (WGEA) serta Working Group on Extractive Industries (WGEI) dari International Organizations of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). iCED juga menyelenggarakan program pelatihan pemeriksaan lingkungan di bawah Indian Technical and Economic Cooperation Programme (ITEC) atau Program Kerja Sama Teknis dan Ekonomi India yang didukung penuh oleh Kementerian Luar Negeri India.

"iCED turut melakukan program pelatihan di domestik mengenai audit isu lingkungan dan area pembangunan berkelanjutan untuk program pengembangan kapasitas internalnya. iCED memulai upaya peningkatan kapasitasnya pada tahun 2013," kata Sayantani Jafa dalam wawancara tertulis dengan *Warta Pemeriksa*, pertengahan Juli.

Menurut dia, fasilitas itu didirikan untuk memanfaatkan pengalaman India yang telah melakukan pemeriksaan lingkungan selama bertahun-tahun. Selain itu, untuk memberikan pelatihan secara ekstensif dan bertindak sebagai forum berbagi pengalaman dan penelitian.

Fasilitas dan lingkungan di iCED juga dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan. Sebesar 85 persen dari total luas lahan iCED merupakan zona hijau dengan aneka ragam flora dan fauna.

"Kami juga menerapkan Energy Conservation Building Code 2006 untuk pemilihan lokasi bangunan, penggunaan material selama konstruksi, efisiensi energi dan air, kualitas lingkungan dalam ruangan, dan lainnya."

Dia menambahkan, iCED menggunakan energi terbaru melalui ladang tenaga surya, daur ulang limbah melalui instalasi pengolahan limbah, pengomposan, hingga penggunaan pendingin/pemanas geothermal untuk area tertentu. "Sejumlah langkah itu menjadi wujud komitmen SAI India terkait lingkungan berkelanjutan," katanya.

Sayantani menilai, iCED memiliki sejumlah kelebihan dibanding lembaga akademis atau pendidikan lainnya. Sebab, iCED dapat melacak inisiatif di seluruh spektrum kegiatan pemerintah, sehingga hal tersebut akan membuat pemeriksaan lingkungan yang dilakukan menjadi lebih kuat dan efektif.

"iCED juga menunjukkan praktik ramah lingkungan melalui infrastruktur fisiknya yang ramah lingkungan serta 85 persen merupakan 'zona hijau' dengan habitat alami yang dilestarikan di area kampus," katanya.

Terkait tujuan dan target pembentukan iCED, Sayantani menjelaskan bahwa iCED memiliki visi untuk menjadi *centre of excellence* global demi meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola di bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan misi kami adalah mengembangkan produk berkualitas tinggi dalam pelatihan dan penelitian untuk memperkaya pemeriksaan lingkungan. Hal itu dilakukan melalui pendekatan interdisipliner.

Kemudian, ada beberapa tujuan strategis dari pembentukan iCED. Pertama, menjadi pusat pengetahuan yang mendorong pembelajaran dan membangun kapasitas untuk audit. Lalu mempromosikan pengarusutamaan masalah lingkungan, melakukan penelitian yang menginformasikan proses dalam audit serta struktur tata kelola, dan menjadi pusat informasi untuk penyebaran dan penggunaan secara luas.

"Juga membangun kemitraan dengan SAI dan organisasi lain yang bekerja di bidang ini serta mengembangkan institusi modern yang efisien, efektif dan adaptif."

Peran dan kontribusi iCED

Sayantani menjelaskan, kegiatan iCED secara umum dibedakan dalam dua hal, yaitu pembangunan kapasitas dan penelitian. iCED berperan mengadakan program pengembangan kapasitas melalui program pelatihan, lokakarya, seminar, dan lainnya. Adapun terkait penelitian, iCED berkontribusi dalam pemeriksaan dengan memberikan masukan berbasis penelitian melalui sinergi keahlian internal dan eksternal.

"iCED juga memainkan peran penting dalam proses pemeriksaan melalui penilaian risiko, memberikan masukan tentang pedoman pemeriksaan lingkungan/matriks desain audit yang dibingkai untuk pemeriksaan lingkungan," ujar dia.

Sejak awal, ujar dia, iCED didirikan SAI India sebagai fasilitas pelatihan global INTOSAI terkait pemeriksaan lingkungan. Oleh karena itu, iCED menyediakan pedoman untuk melakukan audit lingkungan dengan membantu dalam pemilihan kriteria, mengidentifikasi tujuan audit dan sumber data.

iCED juga disebutnya membantu merumuskan kriteria, kondisi, penyebab, kesimpulan, hingga rekomendasi untuk memastikan laporan pemeriksaan yang dihasilkan komprehensif.

"SAI India secara aktif mempromosikan akuntansi sumber daya alam sebagai alat penilaian lingkungan yang penting dan telah merilis makalah tentang akuntansi sumber daya alam pada tahun 2020 yang melibatkan *physical accounting*, *monetary valuation*, dan *economic accounting*.

> **iCED juga menunjukkan praktik ramah lingkungan melalui infrastruktur fisiknya yang ramah lingkungan serta 85 persen merupakan 'zona hijau' dengan habitat alami yang dilestarikan di area kampus.**

Dia menambahkan, iCED sejak Agustus 2017 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja di iCED. Ini juga melibatkan para peneliti untuk memberikan masukan.

Selain itu, iCED memperluas jangkauannya dengan mengadakan kesepakatan berbagi pengetahuan dengan lembaga penelitian terkemuka di India. "iCED juga berkontribusi atas nama SAI India untuk proyek penelitian INTOSAI WGEA di bawah berbagai rencana kerja sejak dioperasionalkan," katanya.

Menurut Sayantani Jafa, iCED sejak didirikan sudah menyelenggarakan 214 program pelatihan/lokakarya termasuk, topik terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan tingkat internasional, bilateral, nasional, yang yang melibatkan lebih dari 5.700 peserta. Kedepannya, iCED akan terus berfokus pada pelatihan dan kapasitas serta menjalankan program di tingkat nasional maupun internasional. "Ini utamanya karena aksi iklim dan masalah lingkungan mendapat perhatian yang serius dari SAI," katanya.

Program pelatihan internasional yang diberikan sejalan dengan rencana kerja WGEA yang disetujui oleh CAG India. Program pelatihan internasional mengacu pada pada modul yang disetujui oleh INTOSAI WGEA dan CTAC. Ada program pelatihan umum, seperti pengantar pemeriksaan lingkungan. Kemudian, ada lokakarya dan program pelatihan tentang topik-topik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan berbagai SAI. ●

SATKER BPK TERAPKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Para pegawai mulai terbiasa dengan budaya untuk memilah sampah dan saling mengingatkan satu sama lain.

■ Wahyu Priyono mendampingi Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam kunjungan di Kantor BPK Perwakilan Bali.

Kondisi lingkungan yang terjaga berperan penting untuk mendukung kehidupan manusia, termasuk dalam meningkatkan produktivitas pekerjaan. Hal ini disadari betul oleh setiap Satuan Kerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tak cuma asri dan bersih, Satker di BPK juga mendorong penerapan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Keasrian lingkungan kantor diyakini dapat memberikan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para pekerjanya. Hal itu diyakini oleh Kepala BPK Perwakilan Bali Wahyu Priyono yang berupaya mendukung pelestarian alam dan suasana hijau di kantor. Wahyu meyakini dengan kondisi tersebut, motivasi dan produktivitas pegawai bisa meningkat.

■ **Wahyu Priyono**

Kompleks kantor BPK Perwakilan Bali terdiri atas gedung-gedung dan halaman. Suasana hijau akan langsung terasa ketika kaki pertama kali menjejak di sana. Lapangan upacara dengan rumput hijau akan menyapa seseorang yang berkunjung ke kantor tersebut.

"Biasanya di perkantoran itu *kan* berupa *paving block* tapi kalau di kami itu masih berupa rumput sehingga masih hijau," ungkap Wahyu kepada *Warta Pemeriksa*.

Kemudian, ujarnya, di sekitar rumput itu dikelilingi oleh pepohonan yang menjadi pagar alami. Terdapat pohon rindang maupun pohon hias yang semakin menambahkan kesan teduh.

Kantor BPK Perwakilan Bali juga memiliki kekhasan karena memiliki pura sebagai tempat ibadah umat Hindu. Lokasi pura yang ada di dalam kompleks kantor itu juga rindang dengan banyak pepohonan.

Di dalam kompleks kantor juga terdapat semacam balai atau gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai. Gazebo itu juga berdampingan dengan beberapa hewan yang sengaja dipelihara oleh kantor seperti burung kicau dan ayam ketawa.

Sentuhan hijau juga tak luput di dalam area gedung. Tanaman dalam pot jamak menghiasi ruangan maupun koridor. Di antara ruang kantor dan auditorium juga terdapat taman dan kolam ikan koi.

"Sehingga, orang yang lewat juga terus merasakan lingkungan yang hijau. Kami melihat, isu lingkungan ini menjadi sesuatu yang penting untuk mendukung budaya kerja kami," ujar Wahyu.

Wahyu menyampaikan, BPK Perwakilan Bali memiliki inovasi budaya kerja yang dinamakan KUAT. Budaya kerja itu merupakan akronim dari kreatif dan inovatif, unggul, akuntabel, dan transparan.

Dia menjelaskan, kreatif dan inovatif itu bermakna luas dan tidak hanya di inti bisnis BPK dalam hal pemeriksaan. Hal itu juga termasuk dalam kreativitas menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Berkat sejumlah inovasi layanan yang dilaksanakan, pada 2021, BPK Perwakilan Bali berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.

Untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan di kalangan pegawai, Wahyu terus berupaya mengingatkan bahwa hal itu adalah kepentingan bersama. Lingkungan yang bersih dan nyaman akan mendukung kinerja seluruh pegawai. Menjaga lingkungan juga bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak merokok di sembarang tempat.

"Sebulan sekali di Bali juga ada upacara keagamaan umat Hindu. Sebelumnya, kami biasanya melakukan kegiatan bersih-bersih kantor," ujarnya.

Pemilahan sampah juga terus digalakkan di lingkungan kantor. Sampah kantor dipilah berdasarkan kategori organik dan anorganik. Kemudian, pembuangan sampah dikerjasamakan dengan pihak lain namun masih melibatkan warga sekitar kantor.

BPK Perwakilan Bali bekerja sama dengan pihak eksternal yang bergerak dalam pengelolaan dan pengolahan bank sampah. Sehingga, sampah yang dibuang dari kantor juga akan diproses dan dipilah sebelum berakhir di TPA.

"Sudah ada proses pengolahan di pihak mereka sehingga kami menyiapkan tempat sampah sesuai peruntukannya," ujar Wahyu.

Dia mengakui, terdapat tantangan untuk menyadarkan pegawai budaya memilah sampah. Meski begitu, seiring berjalannya waktu para pegawai mulai terbiasa dengan budaya tersebut dan bisa saling mengingatkan satu sama lain.

Tak hanya dari sisi infrastruktur kantor, BPK Perwakilan Bali juga berupaya mengangkat isu lingkungan dalam pemeriksaannya. Salah satu pemeriksaan tematik lokal yang telah dilakukan BPK Perwakilan Bali yakni pemeriksaan pengelolaan sampah di Denpasar dan Gianyar. Wahyu mengatakan, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak bahkan menjadikan pemeriksaan tersebut sebagai bahan studi bandingnya.

"Ke depannya, kami juga sedang menyiapkan pemeriksaan bertema lingkungan seperti pengelolaan air bersih dan juga pengelolaan sampah di wilayah lain di Bali," ujar Wahyu.

Ekosistem pembelajaran

Bagi Badiklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI, lingkungan merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem pembelajaran. Apalagi, Badiklat sesuai dengan fungsinya adalah tempat belajar sehingga perlu menjaga kondisi lingkungan.

Kepala Sekretariat Badiklat PKN Luky Desriyani mengatakan, Badiklat menganggap lingkungan bukan saja secara pasif diartikan sebagai tempat, namun juga berperan aktif dalam menentukan efektivitas proses *transfer knowledge* dan pembangunan budaya organisasi demi tercapainya visi dan misi organisasi.

"Jadi kita melihat lingkungan sebagai suatu sarana atau suatu ekosistem tadi, yang bisa mendukung atau tidak mendukung kondisi pembelajaran sehingga harus dijaga supaya nanti sifatnya kondusif untuk mendukung ekosistem pembelajaran," tutur dia, kepada *Warta Pemeriksa* di Jakarta.

Sebagai tempat *transfer knowledge*, lingkungan Badiklat PKN sejatinya memang menjadi manifestasi dari praktik penerapan manajemen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan lingkungan kantor Badiklat PKN diarahkan pada beberapa hal.

Pertama, pembangunan lingkungan yang ramah dan produktif untuk insan pembelajar. Berikutnya, pembangunan lingkungan yang mendukung program *environment sustainability*. Ketiga, pembangunan lingkungan yang sejalan dengan visi misi BPK Corpu.

"Selanjutnya, pembangunan lingkungan yang berorientasi pada pelayanan prima dan pembangunan lingkungan yang membangun kepedulian terhadap masyarakat sekitar Badiklat PKN," papar dia.

Walau begitu, untuk kurikulum belum ada yang secara khusus membahas lingkungan, kecuali soal pemeriksaan di bidang lingkungan. Hanya penerapan *green office* dan *eco office* yang sudah dilakukan demi pembelajaran yang baik dan sehat.

Terkait penghijauan, Badiklat memiliki beberapa program, seperti penghijauan rutin yang dilaksanakan oleh sumber daya internal yang mempunyai tugas dan fungsi pemeliharaan lingkungan kantor. Sementara untuk penghijauan periodik, dilaksanakan pada setiap kegiatan peringatan ulang tahun BPK dan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk tanggung jawab dan propaganda manajemen Badiklat PKN untuk bersahabat dengan lingkungan. Sedangkan, penghijauan *targeted*, dilaksanakan sebagai bagian dari program diklat yang bertema lingkungan hidup dan/atau diikuti oleh SAI negara lain.

Luky menjelaskan, *grand design* manajemen pengelolaan lingkungan Badiklat sebenarnya termaktub di dalam Grand Design Pengelolaan Lingkungan Badiklat PKN Tahun 2020-2024 yang disusun dalam rangka mendukung Renstra BPK. Di dalamnya tertulis juga visi dan misi pengelolaan lingkungan Badiklat. Contohnya, ungkap dia,

berperan aktif dalam mewujudkan Badiklat PKN sebagai Corporate University kelas dunia melalui pendidikan dan pengembangan pemeriksa keuangan negara yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.

Sementara misi pengelolaan lingkungan Badiklat PKN adalah mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan pembelajaran dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan pelibatan semua *stakeholder* Badiklat PKN. Kemudian, mewujudkan Ruang Terbuka Hijau kawasan Badiklat PKN yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial, dan kenyamanan.

"Soal ruang terbuka hijau karena Badiklat ini punya 28 hektare dan yang dimanfaatkan baru 10 hektare, kita inginnya semakin banyak ruang terbuka hijau," katanya.

Badiklat PKN juga mewujudkan pengelolaan sampah yang berkualitas dan berkelanjutan. Dia menegaskan, dengan banyaknya kunjungan para peserta diklat, pengelolaan sampah itu menjadi hal yang krusial. Atas alasan itu, Badiklat PKN bekerja sama dengan beberapa pihak eksternal untuk penyiapan personil spesialis pengelolaan lingkungan. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup Pemda DKI Jakarta terkait pengelolaan pembuangan sampah. Sedangkan untuk sampah medis, Badiklat PKN bekerja sama dengan pihak pengelola sampah medis karena Badiklat pernah digunakan untuk isolasi mandiri.

Dia menambahkan, Badiklat PKN terlebih dulu mencoba menerapkan budaya yang mendukung pengurangan volume sampah itu sendiri (*eco office*), antara lain dengan tidak menggunakan peralatan makan dan minum dari bahan plastik, styrofoam, dan kertas sekali pakai. Kemudian, menggunakan peralatan makan dan

■ Taman Hidroponik di Badiklat

■ **Luky Desriyani**

minum yang dapat digunakan berulang dan membawa alat makan milik pribadi.

Badiklat PKN juga menyediakan air siap minum (*water dispenser*) di area tertentu seperti ruang kelas, area olahraga, dan area publik lain nya.

Langkah lainnya, Badiklat PKN mengoptimalkan penyiapan konsep naskah dinas melalui aplikasi yang tersedia, seperti aplikasi Jasmin untuk korespondensi dan penyebaran informasi dan/atau penyampaian dokumen melalui media elektronik.

Pembelajaran pun diarahkan untuk seminimal mungkin menggunakan kertas. Adapun terkait sampah *hardware* elektronik, Badiklat PKN mengacu pada mekanisme penatausahaan Barang Milik Negara, dimana sampah-sampah elektronik dipindahtangankan dan dihapuskan sesuai peraturan yang berlaku.

Bergandengan dengan warga

Berada di wilayah yang rawan banjir, mendorong Badiklat untuk bergandengan tangan dengan warga maupun lembaga lain di sekitar nya. Badiklat siap menjadi lokasi penampungan bagi warga yang terdampak banjir. Badiklat juga menyediakan gerobak sampah untuk warga yang membersihkan lingkungan.

Selain itu, Badiklat berbagi tugas dengan dua pihak atau lembaga yang lokasinya berdampingan dengan gedung Badiklat dalam hal penanganan sampah. Hal ini berupa jadwal pembersihan yang bergantian dilakukan tiap pekan.

"Kita *kan* harus menjaga lingkungan sekitar ini supaya masyarakat nyaman, dan yang punya tenaga kebersihan berbayar *kan* kita bertiga ini, makanya kita bertiga ini merasa bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan untuk masyarakat sekitar," ucap dia.

Luky berharap tidak terjadi banjir kembali di Badiklat maupun wilayah sekitar Kalibata tersebut. Sejauh ini, banjir di sekitar Badiklat terjadi karena air luapan sungai dari lokasi lain. ●

MEMBANTU CPNS BERADAPTASI DENGAN HABITUASI

Satker pun diminta ikut ambil peran dan menyisipkan program penguatan integritas.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang cukup banyak pada tahun ini, yaitu 1.405 orang. Untuk membantu mereka beradaptasi, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) pun menyelenggarakan program habituasi. "Pada dasarnya, habituasi ini merupakan program pembiasaan diri di lingkungan baru, yaitu penempatan definitif mereka," ujar Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN BPK, Juska Meidy Enyke Sjam kepada *Warta Pemeriksa*, di Jakarta, belum lama ini.

■ **Juska Meidy Enyke Sjam**

Ketika masuk ke BPK, para CPNS menjalani rangkaian pelatihan yang dinamakan pelatihan dasar (latsar). Untuk tahun ini, latsar telah dimulai pada 4 Maret 2022 dan dibuka oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Program yang dirancang oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini berlangsung selama 4 bulan.

Ada empat Agenda yang dipelajari oleh CPNS BPK. Agenda pertama yaitu sikap perilaku bela negara. Kedua, nilai-nilai dasar ASN (Aparatur Sipil Negara). Ketiga, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kemudian Agenda keempat yakni habituasi dan aktualisasi.

"Jadi pada bulan Juli 2022 ini, program latsar CPNS BPK sudah sampai pada Agenda 4. Mereka sudah berada di penempatan definitif masing-masing dan sedang menjalani program habituasi. Melalui program ini, mereka akan mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri," ungkap dia.

Pada Agenda 1-3, para CPNS diajarkan mengenai kompetensi yang diperlukan melalui berbagai mata pelatihan. Pada Agenda 4 yaitu habituasi, kompetensi dan sikap perilaku yang diperlukan akan dibiasakan dan diaktualisasikan. Harapannya akan terus melekat pada diri mereka.

Untuk tahun ini, habituasi dilaksanakan pada awal Juni hingga Juli 2022. Selama periode satu bulan itu, CPNS akan merancang suatu proyek untuk direalisasikan. Aktivitas tersebut berupa sesuatu yang bermanfaat untuk satker penempatannya dan mereka membuat laporan aktualisasi yang akan dievaluasi atau diuji.

Evaluasi atas proyek aktualisasi ini pun cukup menentukan tingkat keterimaan mereka menjadi PNS. Ini karena bobot penilaian untuk habituasi sekitar 50 persen dari nilai latsar. Dengan komposisi 20 persen untuk rancangan dan 30 persen untuk aktualisasinya.

Jika misalnya tidak lulus ujian evaluasi, para CPNS diberikan kesempatan untuk mengulang sekali lagi. Pada kesempatan ini, mereka akan diminta untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangannya. "Batas kelulusannya minimal 70,01. Jadi kalau nilainya 70, itu tidak lulus," papar Juska. Selain itu mereka juga akan dievaluasi sikap dan perilakunya selama pelatihan. Agar lebih maksimal, mereka diberikan pendampingan oleh *mentor* dan *coach*.

Mentor merupakan pegawai di satker yang membimbing keseharian CPNS. Termasuk membantu mereka mengidentifikasi dan mendalami permasalahan yang ada di satker hingga membantu merancang dan melakukan proyek aktualisasi. Mentor memiliki peran penting karena bertindak sebagai *role model* bagi mereka.

Jadi, mentor bertindak sebagai figur yang memperkenalkan mereka dengan kondisi, budaya, dan tugas di lingkungan tempat mereka berada. "Sebagai pegawai, biasanya kita ingat ketika baru pertama kali bekerja. Kita ingat dengan orang-orang yang pernah mengajarkan kita terkait pekerjaan. Nah, *mentor* ini harapannya bisa menjadi figur itu. Harus mengajarkan kebaikan yang diterapkan di organisasi," jelas Juska.

Lalu, siapa saja yang boleh menjadi *mentor*? Juska menyebut antara lain pegawai senior atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala satker. Selain

mentor, CPNS juga akan dibantu oleh *coach* yang lebih berperan sebagai motivator. Dengan begitu, mereka dapat memberikan upayanya yang terbaik dalam proyek aktualisasinya. Peran ini diisi oleh para *coach* dari Badiklat atau satker lain seperti Biro SDM.

BPK pun telah memiliki beberapa *coach* yang sudah tersertifikasi untuk peran ini. "*Coach* membimbing dari jarak jauh secara online karena tidak berada di satker penempatan CPNS. Mereka melakukan *e-coaching*, mengadakan rapat konsultasi dan memantau perkembangan proyek aktualisasi para CPNS," kata dia.

Modifikasi BPK

Pada dasarnya latsar merupakan program yang dirancang oleh LAN yang tercantum dalam Peraturan LAN No. 10/2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS pun terbilang cukup detail. Mulai dari struktur kurikulum, agenda pelatihan, dan pelaksanaan latsar. Karenanya, dalam penyelenggaraan latsar, BPK tidak banyak melakukan modifikasi.

Sedikit perbedaan yang dilakukan BPK adalah terkait dengan mata pelatihan orientasi keBPKan. "Program yang dinamakan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas itu dapat dilakukan di awal atau akhir latsar. Kita inginnya sebelum mereka menjalani pelatihan, mereka sudah paham tentang BPK. Jadi kita adakan orientasi ke BPKan di awal," papar dia.

Hal lain yang dapat berbeda adalah terkait metode pembelajarannya. Dalam peraturannya, LAN mendorong pola Blended Learning yaitu adanya belajar mandiri, pertemuan luring (klasikal), dan pertemuan daring (*online*). Akan tetapi, karena kondisi pandemi, BPK tidak bisa mengadakan pertemuan secara klasikal. Apalagi jumlah CPNS pada tahun ini cukup besar. Karenanya, BPK pun memilih untuk menyelenggarakan latsar secara daring. "Untuk habituasi, mereka laksanakan di satker penempatannya. Namun, dalam pelaksanaannya di satker, tergantung situasi di satkernya apakah mereka nanti *online* atau *offline*," jelas Juska.

Karena *full online* kecuali habituasi, Badiklat pun menyadari adanya kekurangan. Misalnya, metode pembelajaran perlu dibuat semenarik mungkin supaya tidak membosankan. Selain itu, sulit untuk memahami profil para CPNS. Termasuk tingkat daya tahan mental mereka dalam menghadapi tekanan, serta sikap dan perilaku mereka.

"Berbeda dengan sebelumnya dimana para CPNS dikumpulkan semua secara fisik di Badiklat selama latsar. Sehingga kalau ada yang mengalami tekanan mental, itu bisa terdeteksi sejak dini." tambah dia.

Sebagai langkah antisipasi, Badiklat akan melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan diklat untuk peningkatan kualitas metode pengajaran. Selain itu, Badiklat pun mencoba untuk terus menerus menjaga komunikasi dan interaksi dengan para CPNS. Dengan begitu, diharapkan mereka memiliki orang yang dapat membantu ketika menemukan kesulitan dan masalah.

"Karena 1.400 itu kan banyak. Kalau salah mendidik, bisa jadi masalah. Sekarang jumlah pegawai BPK sekitar 7.000. Jadi komposisi 1.400 itu cukup signifikan. Makanya harus ditangani dengan baik karena akan menentukan masa depan BPK dan bangsa," ungkap Juska.

Saat program habituasi, satker pun ikut ambil peran dan menyisipkan program penguatan integritas. Bentuk kegiatannya bisa apa saja. Mulai dari shalat Subuh bersama atau pembinaan mental. Kepala satker pun diminta agar ikut turun langsung untuk membentuk *mind set* dan berbicara mengenai integritas kepada para CPNS.

Saat ini pun, Badiklat tengah menyusun program penguatan integritas untuk seluruh pegawai BPK. Berbagai *benchmarking* pun telah dilakukan terkait dengan hal ini. Mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan, dan lembaga lembaga lain.

"Ini masih dalam tahap pengembangan. Tapi, intinya adalah Badiklat memberi perhatian khusus ke arah itu, untuk CPNS dan seluruh pegawai di semua level. Bagaimanapun juga, sebagai lembaga pendidikan BPK, Badiklat dapat mengambil peran dalam membentuk, menjaga, dan menguatkan nilai integritas pegawai," papar Juska. ●

(KEMBALI) MERAJUT KHAYAL TENTANG #PEMERINTAHANDIGITAL

■ OLEH **MOCHAMMAD GILANG RAMADHAN**
PEGAWAI TUGAS BELAJAR INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

RUU PDP tidak hanya dirancang untuk mengatur tata kelola pemerintahan secara elektronik baik hubungan antar instansi (G2G), dengan dunia usaha (G2B), dan publik (G2C); tapi juga mencakup aspek *digital economy* dan *digital society*.

Selayang Pandang RUU Pemerintahan Digital

Sejak Desember 2021, Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) telah menginisiasi pembahasan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Digital (RUU PDP) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2020-2024. Sebuah prakarsa yang patut disambut baik dan diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat digitalisasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah. RUU PDP tidak hanya dirancang untuk mengatur tata kelola pemerintahan secara elektronik baik hubungan antar instansi (G2G), dengan dunia usaha (G2B), dan publik (G2C); tapi juga mencakup aspek *digital economy* dan *digital society*.

Inisiatif ini menjadi angin segar bagi upaya transformasi digital nasional dan diharapkan dapat memperkuat inisiatif digitalisasi yang sudah berjalan selama ini RUU PDP juga diharapkan melengkapi regulasi yang sudah ada sebelumnya, seperti Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengatur tata kelola hingga evaluasi penyelenggaraan SPBE. Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang mengatur tata kelola data di pemerintahan yang diharapkan dapat mengatasi 'tercerai-berai'nya data selama ini, antara lain melalui penerapan kaidah interoperabilitas data. Selain itu, upaya ini juga mengindikasikan keseriusan negara untuk *keep up* dengan perkembangan teknologi. Di masa depan, bukan tidak mungkin inisiatif ini menjadi tonggak bagi proyek kolaborasi skala besar, semisal prakarsa mGov4EU[1] untuk membangun interoperabilitas layanan *mobile* pemerintah lintas-negara di Uni Eropa.

Sebagai inisiator, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah secara aktif menyampaikan gagasan sekaligus memperoleh pandangan dari berbagai instansi pemerintah terkait RUU PDP. Kemendagri, misalnya, menyoroti tantangan penyelenggaraan pemerintahan digital (selanjutnya disebut e-Gov) seperti ketimpangan literasi digital antar daerah. Sementara Kemenkominfo berharap RUU PDP sebagai aturan yang lebih tinggi dapat mengakomodasi aspek-aspek yang telah diatur dalam SPBE. Lebih lanjut, BSSN sependapat mengenai cakupan RUU PDP yang diharapkan tidak hanya mengatur administrasi pemerintahan, namun juga transformasi digital secara nasional, sekaligus menekankan perlunya UU yang mengatur tata kelola keamanan siber. Selain itu, DPD juga telah menggelar rapat pembahasan RUU ini dengan berbagai instansi pemerintah lainnya seperti KemenPAN-RB, Kemenkeu, BRIN, dan instansi lainnya. Hal ini mengindikasikan keseriusan DPD dan jajaran instansi pemerintah dalam upaya optimalisasi transformasi digital nasional.

[1] https:///www.mgov4.eu/

> **Pengembangan pemerintahan digital seyogyanya difokuskan pada upaya meningkatkan layanan pemerintah dengan digitalisasi sebagai alat dan bukan tujuan, sebagaimana disinggung oleh Kemenkominfo dan KemenPANRB.**

Masukan Untuk RUU PDP

Prakarsa yang telah diinisiasi DPD yang dilanjutkan dengan pembahasan dengan instansi dapat diharapkan untuk menghasilkan rumusan RUU PDP yang komprehensif. Namun demikian, selalu ada ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan tambahan dalam perumusan RUU PDP.

1. e-Gov sebagai alat, bukan tujuan

Pengembangan pemerintahan digital seyogyanya difokuskan pada upaya meningkatkan layanan pemerintah dengan digitalisasi sebagai alat dan bukan tujuan, sebagaimana disinggung oleh Kemenkominfo dan KemenPANRB. Dalam hal ini, inisiatif digitalisasi sebaiknya dimulai dengan tujuan meningkatkan layanan dan bukan dengan tujuan membangun sistem/aplikasi baru.

Sebagai ilustrasi, pemerintah Singapura menghapus kewajiban pembaruan surat izin mengemudi (SIM) bagi warganya. Penghapusan ini (salah satunya) diinisiasi dari rencana pengembangan sistem terotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi layanan pembaruan SIM bagi warga Singapura. Namun demikian, pertanyaan yang 'gagal' dijawab adalah mengapa perlu dilakukan pembaruan SIM? Singapura sudah menerapkan pendekatan *demerit point*, yang berimplikasi berkurangnya kelayakan pengemudi dalam berkendara (baik karena alasan kesehatan maupun karena ketidakpatuhan) yang dapat berujung pada pencabutan SIM. Oleh karena itu, inisiatif pengembangan layanan otomatis pembaruan SIM justru berujung pada penghapusan kewajiban pembaruan SIM.

Ilustrasi di atas menekankan esensi dari pemerintahan digital sebagai alat untuk mencapai tujuan. Bukan tidak mungkin, sebagian tujuan dari inisiatif pemerintahan digital dapat dicapai dengan cara lain yang lebih efektif dan efisien.

2. e-Gov untuk memperluas layanan, bukan membatasi

Nilai tambah layanan berbasis digital adalah peningkatan kecepatan dan kemudahan layanan. Namun demikian, salah satu aspek penting dari sektor publik adalah karakteristik non-kompetisi dan non-substitusi. Oleh karena itu, pembatasan layanan melalui saluran digital dapat berdampak pada pembatasan layanan kepada publik dengan keterbatasan akses untuk memperoleh haknya dan/atau memenuhi kewajibannya. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memiliki dampak hukum.

Sebagai ilustrasi, pilihan untuk menggunakan sarana transportasi *online* sepenuhnya hak dari masyarakat dan didasari pertimbangan personal seperti biaya dan kenyamanan. Hal ini tentu berbeda dengan misalnya, penyampaian SPT pajak, yang apabila dibatasi hanya dengan saluran digital (e-Filing) dapat berakibat denda bahkan pidana bagi warga dengan akses internet atau literasi digital yang terbatas.

Temuan dari Reddick & Anthopoulos[2] menyatakan bahwa layanan digital pemerintah paling optimal untuk pengumpulan dan diseminasi informasi publik, sementara layanan tradisional masih dominan untuk penyediaan layanan dan penyelesaian masalah. Meskipun lingkup penelitian tersebut adalah layanan publik di Kanada pada 2014, studi tersebut memiliki relevansi kondisi layanan publik di masa kini, baik secara umum maupun di Indonesia secara khusus. Secara praktis, RUU PDP dapat mengakomodasi diversifikasi saluran layanan dari pemerintah, khususnya untuk pengguna layanan dengan akses internet dan literasi digital yang terbatas.

3. Rencana aksi yang *do-able*

Selaras dengan masukan sebelumnya, salah satu pertimbangan penting adalah posisi Digital Government Index (DGI) Indonesia. Per 2020[3], DGI Indonesia secara umum berada di atas rerata

[2] Reddick, C., & Anthopoulos, L. (2014). Interactions with e-government, new digital media and traditional channel choices: citizen-initiated factors. Transforming Government: People, Process and Policy.

[3] https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia, diakses pada 18 Juni 2022 pukul 17.40 WIB

dunia, Asia, dan ASEAN. Namun demikian, berada di peringkat 88, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura (11), Malaysia (47), dan Thailand (57). Selain itu, Indonesia masih cukup tertinggal dari rata-rata Asia dan ASEAN untuk aspek infrastruktur. Oleh karena itu, penting juga membahas mengenai rencana jangka menengah-panjang yang *do-able* untuk mengatasi ketertinggalan ini dalam rangka membangun pemerintahan digital dan transformasi digital nasional. Hal ini juga sebagaimana disinggung setidaknya oleh KemenPAN-RB dan Kemenkominfo. Selain itu, rencana dimaksud tentunya memiliki implikasi sumber daya (keuangan negara) sehingga pembahasan dengan Bappenas dan Kemenkeu merupakan sebuah keniscayaan.

Selain indeks digital secara umum dan infrastruktur secara khusus, salah satu tantangan dalam transformasi digital nasional adalah interoperabilitas data antar instansi pemerintah. Oleh karena itu, peta jalan yang telah disusun dalam Perpres 39/2019 dapat diakomodasi dan/atau diperkuat sebagai bagian dari rencana implementasi RUU ini nantinya. Langkah pertama yang harus diupayakan adalah mengikis mentalitas silo antar instansi, di mana Perpres SDI dan peta jalannya merupakan tonggak penting bagi interkoneksi antar instansi.

Secara konseptual, upaya ini dapat merujuk pada *stage model* untuk pengembangan kapabilitas untuk integrasi sistem antar instansi pemerintah (Klievink & Janssen)[4]. Secara praktis, mengingat sudah banyaknya sistem informasi yang dibangun, interkoneksi dapat dimulai dari *back-end* sistem, yaitu dengan pertukaran data antar instansi, untuk kemudian diintegrasikan dari sisi antarmuka dengan pengguna (*front-end*), atau setidaknya meminimalisasi input data berulang pada berbagai *platform* layanan publik.

4. *Sandbox* atau purwarupa (*prototype*)

Pengembangan pemerintahan digital dan transformasi digital nasional merupakan sebuah inisiatif dengan tantangan sosio-teknikal-kultural yang besar. Oleh karena itu, RUU dimaksud kiranya dapat mengakomodasi paradigma '*sandboxing*' atau 'purwarupa'.

Paradigma ini diimplementasikan dalam bentuk digitalisasi dalam skala terbatas. Kemudian, ekspansi dilakukan secara berkesinambungan sesuai visi transformasi digital dengan referensi hasil implementasi pada skala terbatas yang telah dilaksanakan. Hal ini termasuk *lesson learned* dari kegagalan/hambatan yang terjadi.

Namun demikian, dalam konteks pemerintahan, penerapan paradigma ini perlu mempertimbangkan aspek akuntabilitas sehingga memerlukan payung hukum yang tegas dan jelas. Hal ini menekankan urgensi pembahasan aspek ini di level UU. Selain itu, pembahasannya perlu melibatkan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal pemerintah. Hal ini diharapkan dapat membangun ekosistem inovasi yang mengakomodasi *sandboxing* atau *prototyping* namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Penutup

Inisiatif RUU PDP dan pembahasannya oleh DPD dan berbagai instansi pemerintah merupakan angin segar bagi transformasi digital nasional. Namun demikian, inisiatif ini merupakan upaya yang memerlukan sumber daya dan persistensi, tidak hanya dalam pembahasan sampai dengan penetapan, namun juga implementasinya. Kiranya masukan-masukan yang diberikan ini dapat menjadi referensi tambahan untuk suksesnya pengembangan pemerintahan digital dan transformasi digital nasional Indonesia.

Catatan:
Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan pendapat instansi di mana penulis bekerja.

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah.
Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

[4] Klievink, B. and Janssen, M. (2009), "Realizing joined-up government - Dynamic capabilities and stage models for transformation", Government Information Quarterly, Vol. 26 No. 2, pp. 275–284.

1
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, memberikan ceramah dengan mengangkat tema "Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara", kepada para peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Tinggi (Sespimti) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), di Bandung, Jawa Barat, 24 Juni 2022.

2
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2021 pada kementerian, lembaga, dan badan lainnya di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V), 27 Juni 2022. Ketua BPK, Isma Yatun, sebagai Plt. Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, menyebut capaian tersebut menunjukkan komitmen dan upaya nyata dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hadir dalam penyerahan ini antara lain Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, dan Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V) BPK, Akhsanul Khaq, serta para pejabat dan undangan lainnya.

3-5
Rapat konsultasi Pimpinan BPK RI dengan BAKN DPR RI, 16 Juni 2022. Rapat dihadiri Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana, dan Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing.

6-7
Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana menghadiri Musrenbang Polri yang digelar di The Tribrata Darmawangsa, 14 Juni 2022.

8-9
Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VII, Hendra Susanto menghadiri acara "Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa" di Gedung Serba Guna Kabupaten Way Kanan, Lampung. Turut hadir Komisi XI DPR RI di Lampung, 27-28 Juni 2022.

10
Penyerahan LHP Kinerja Holding Defense DI dihadiri oleh Anggota VII BPK/ Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, 23 Juni 2022.

11-12
Pra Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksana BPK Tahun 2022 (penutupan pemeriksaan) dihadiri Kaditama Revbang, B Dwita Pradana, 24 Juni 2022.

13-14
Pengajian Rutin Ikistra dan DWP Setjen BPK kelompok VII (AKN III dan Biro SDM), 23 Juni 2022.

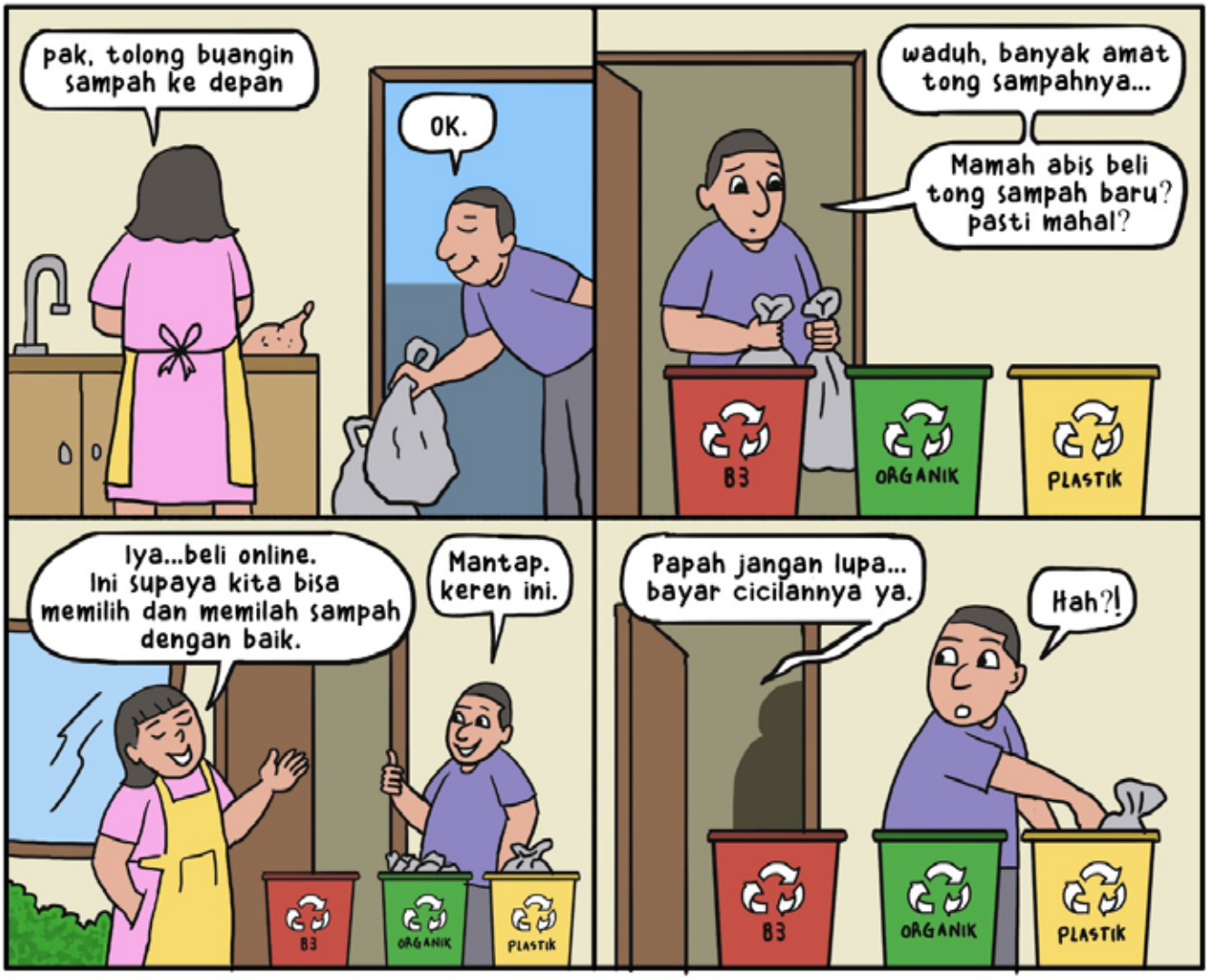

Kuis

Pada majalah *Warta Pemeriksa* edisi 5 2022 disebutkan bahwa IHPS II 2021 memuat hasil pemeriksaan tematik atas 2 prioritas nasional. Sebutkan 2 pemeriksaan tematik tersebut.

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email **wartapemeriksa@bpk.go.id** dengan subjek **'Kuis'**. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SEMAKIN MUDAH MENGAKSES INFORMASI MELALUI...

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

www.bpk.go.id

BPK RI Official

@bpkri

@bpkriofficial

08111907010

bpk.ri

PPID
EPPID Mobile

foto: wayhomestudio-freepik

Foto: Freepik, Ruben Hutabarat-Unsplash, Zitrac-Unsplash, Rayyan Moeslim-Unsplash